

CARA

Edisi Juli 2021

PANDANG

Inspirasi Terkini!

MANUVER PRESIDEN 3 PERIODE

Penambahan masa pemerintahan presiden menjadi tiga periode tak lebih dari sekedar manuver politik. Wacana ini sama sekali tak mendapat simpati karena dianggap mengkhianati amanat Reformasi.



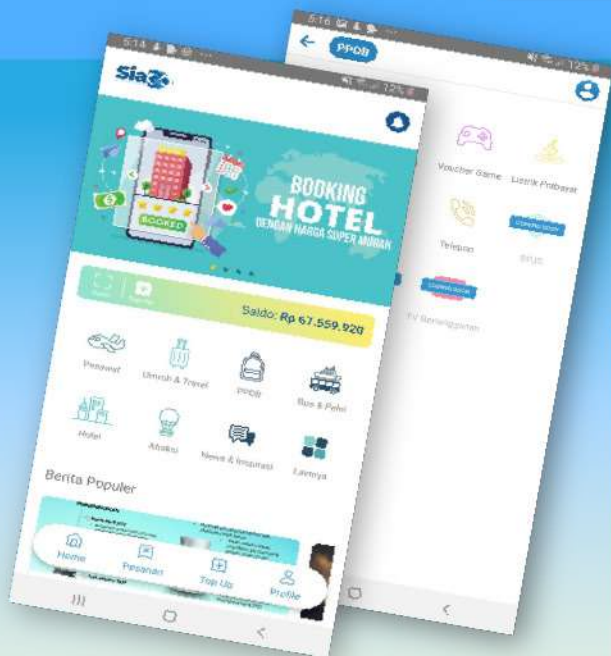
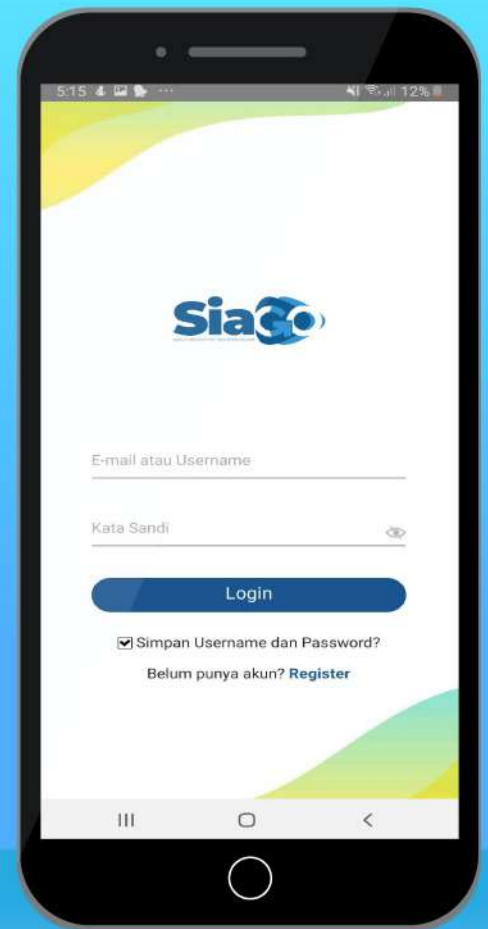
**POLITIK BALAS BUDI
RELAWAN JOKOWI**

**TSUNAMI COVID-19,
PERAN TOKOH AGAMA DINANTI**

**BERTATAP MUKA DI
TAHUN AJARAN BARU**

Solusi Kemudahan Transaksi Online

SiaGO adalah platform pembayaran yang dibangun berdasarkan komitmen untuk memberikan solusi layanan pembayaran yang mudah bagi mitra kami



Memudahkan Pembayaran & Pembelian



Pesawat



Kapal Laut



Kereta Api & Railink



Bus



Hotel



Pulsa Elektrik & Paket Data



Voucher Game



PLN & Token Listrik



Telepon



Internet



TV Berlangganan



PDAM



Multi Finance



BPJS Kesehatan

Customer Service



021 - 8276 0392



0812-1120-4801

DAFTAR ISI

	<u>TAJUK</u>
BERCERMINLAH KEPADA NELSON MANDELA!	5
	<u>LAPORAN UTAMA</u>
WACANA MENGKHIANATI AMANAT REFORMASI	9
	<u>LAPORAN KHUSUS</u>
TES WAWASAN KEBANGSAAN: DRAMA AKHIR PELEMAHAN KPK	12
KEJANGGALAN ALIH STATUS PEGAWAI KPK	15
FIRLI MELEMAHKAN KPK?	18
	<u>NASIONAL</u>
PILAH-PILIH PANGLIMA TNI PENGGANTI HADI	20
POLITIK BALAS BUDI RELAWAN JOKOWI	22
KOMUNITAS "CANGKIR OPINI", SUARAKAN ISLAM MODERAT	26
DRAMA KEBAHAGIAAN BERGANTI KESEDIHAN	28
	<u>PENDIDIKAN</u>
PEMBELAJARAN TATAP MUKA, UPAYA MENGHINDARI <i>LEARNING LOSS</i>	30
BERTATAP MUKA DI TAHUN AJARAN BARU	33
	<u>OPINI</u>
MENYOAL DEMOKRASI SETENGAH HATI	38
MERAWAT MASA DEPAN KPK	40
	<u>RESENSI</u>
PETUALANGAN SERU TIGA SAHABAT	42
MENGUASAI KATA-KATA	44
	<u>BUDAYA</u>
IBU	46
	<u>BAHASA</u>
GEJALA AKRONIMISASI	50
	<u>ARTIS</u>
ROSSA, KELUAR UANG DULUAN UNTUK LIBURAN	54



LAPORAN UTAMA MENOLAK MANUVER PRESIDEN TIGA PERIODE

Wacana penambahan masa jabatan selalu menjadi isu yang disuarakan di setiap periode kedua kepemimpinan presiden akan berakhir. Manuver politik ini dianggap sangat "basi" karena seringkali "didaurulang". Banyak pihak tak menyetujui diskursus ini karena mengabaikan peran perkaderan di tubuh partai politik.

6



NASIONAL TSUNAMI COVID-19, PERAN TOKOH AGAMA DINANTI

24

INTERNASIONAL SEPAK BOLA MENYATUKAN EROPA

36

ARTIS

DEWI PERSSIK

AKUN IG HILANG DAN DIBAJAK

53



Waspada Berwisata di Pantai Selatan

Akhir Mei lalu, kita mendengar berita yang mengagetkan, empat anak muda tewas dan 3 lainnya hilang karena tersambar ombak ketika berwisata ke pantai selatan Malang. Mula-mula mereka asyik berfoto selfie di atas batu karang. Namun nasib, ombak besar datang tiba-tiba dan mereka tersambar sehingga jatuh ke laut yang dasarnya dipenuhi batu karang.

Kejadian tersebut sebenarnya bukan yang pertama kali. Kecelakaan karena *stupid mistake* yang berakibat hilangnya nyawa seperti itu sudah sering terjadi. Namun, karena lalai dan minimnya tanda peringatan/larangan, sehingga kecelakaan masih sering terjadi.

Akhirnya, wisata yang sejujurnya ingin mencari hiburan dan kebahagiaan malah berubah menjadi kesedihan. Duka mendalam didapati keluarga yang ditinggalkan. Orangtua juga pasti akan merasa menyesal karena melapas putra/putri remajanya untuk pergi berwisata tanpa pengawasan.

Pada umumnya, pantai Selatan memang menawarkan pemandangan laut yang menarik. Tapi, pantai selatan punya ciri ombak yang besar dan wilayah pesisirnya senantiasa dipenuhi bebatuan karang yang tajam. Karena itulah, dibanding dengan sekitaran pantai utara, warga di pantai selatan jarang yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini karena laut

selatan tingkat bahayanya lebih tinggi dibanding laut utara.

Supaya tidak terjadi kecelakaan seperti yang demikian secara berulang, maka penjaga wisata pantai perlu memperbanyak tanda peringatan. Membuat Batasan bagi tempat berfoto para wisatawan. Selain itu, bagi wisatawan hendaknya sadar diri bisa mengukur mana tempat yang aman dan berbahaya. Jadi bukan sekedar ingin narsis, malah menjadi bencana.

Ikrar Bakti,
Malang

Harga Air Mineral yang Tinggi

Air mineral menjadi kebutuhan yang penting bagi manusia. Sayangnya, dalam beberapa tahun ini, saya merasa harga air mineral terus menaik. Bayangkan saja untuk membeli air mineral ukuran botol sedang dihargai Rp3.500. Itu jika beli di toko kelontong. Apalagi jika beli di pinggir jalan, kadang sampai Rp5.000, atau di bandara bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000. Padahal itu air loh...

Air adalah salah satu sumber daya alam, yang di Indonesia, keberadaannya sangat melimpah. Tidak seperti (maaf) di sejumlah negara yang kekurangan air bersih. Jangankan untuk sekedar minum, untuk mandi saja, kesusahan. Apakah ada yang salah dengan pengelolaan air bersih sebagai konsumsi minum sehingga harga bisa begitu mahal.



Pada dasarnya, air sebagai sumber daya alam haruslah gratis karena negara menjaminkannya. Okelah, yang kita beli adalah jasanya, desain produknya, dan segala prosesnya, tapi masih terbilang mahal karena air minum adalah kebutuhan sehari-hari.

Saya yakin, bahwa ini ada kesalahan tata kelola sumber daya air sehingga sesampainya di konsumen harganya bisa sedemikian mahal. Untuk itu, kami berharap supaya pemerintah bisa mengambil sikap untuk menjembatani agar harga air mineral itu bisa lebih murah harganya. Sehingga orang miskin uangnya tidak habis hanya untuk membeli air minum. Bagaimana mereka akan menyisihkan uang untuk makan dan sekolah anak-anak mereka.

Aris Rahman,
Jakarta



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Faozan Amar

Pemimpin Perusahaan : Zulfikar Rachman **Penanggung Jawab:** Yayan Sopyani, Michael Malik **Pemimpin Redaksi :** Nafik Muthohirin **Redaktur Pelaksana :** Amir Fiqi, Zainal Arifin **Redaktur :** Robby Firmansyah, Habibi Khasim, Ridwan **Desain Grafis :** Hengki, Dwi Saputra, Soki Rahman Wardi, Taqi khana **IT :** Zulfikar Iskandar **Fotografer :** Robby Firmansyah, Jirga **Reporter :** Ika, Amir, Edi, Afi, Marshal, Malik, Ridwan, Zildan Syauqi **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayat

Alamat Redaksi

Jalan Tebet Dalam IV Nomor 7B, RT 11/RW 01, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12081 Telp: (021) 21383521

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

BERCERMINLAH KEPADA NELSON MANDELA!

Kita menemukan banyak orang pintar di negeri ini, tapi sedikit sekali di antara mereka yang bisa kita sebut negarawan. Hal ini karena banyak orang pintar yang lebih memikirkan hasrat kuasa dibanding benar-benar ingin memajukan pembangunan nasional.

Begitupun dengan merebaknya wacana presiden tiga periode belakangan ini. Bagi Presiden Jokowi, jika isu ini sengaja dibuat untuk melanggengkan kedudukannya sebagai orang nomor satu di Indonesia, maka dia tak ubahnya orang pintar yang hanya memenuhi nafsu kuasanya. Tetapi, jika manuver politik itu datang dari orang sekitarnya dan dia benar-benar menolaknya, maka dia lebih memilih menjadi negarawan setelah dua kali menjabat presiden.

Dalam hal ini, Jokowi hendaknya meneladani Nelson Mandela. Dia adalah pejuang revolusi anti-apartheid yang berhasil menduduki kursi Presiden Afrika Selatan (1994-1999). Tak pelak, Mandela disebut sebagai Presiden Afrika Selatan berkulit hitam pertama. Dia terpilih sebagai presiden dari hasil proses pemilihan yang demokratis.

Mandela sangat dipuja-puji mayoritas rakyat Afsl. Bahkan, saat itu, gelombang suara rakyat menginginkannya untuk menjabat presiden seumur hidup. Namun, Mandela sangat berbeda karakter dengan para pemimpin dunia lainnya. Pria yang pernah menjadi tahanan politik selama 27 tahun itu tidak berhasrat menjadi presiden terlalu lama. Dia menolaknya dan memilih turun setelah periode kepemimpinannya habis.

Mandela hanya menjabat presiden 5 tahun, meski sebenarnya ada peluang besar untuk menjabat presiden periode kedua, ketiga dan mungkin seterusnya. Di tengah gempita rakyat Afsl memujanya, dia turun dan menghabiskan masa pensiunnya untuk memberdayakan desa, memberantas kemiskinan, memberantas HIV/

AIDS dan membangun sekolah melalui Nelson Mandela Foundation.

Meski tak bisa disamakan antara Jokowi dengan Nelson Mandela, namun semangatnya patutlah menjadi teladan. Jokowi tak perlu termakan oleh isu tersebut, karena sangat mungkin manuver ini bagian dari jebakan. Jebakan politik yang justru malah menjatuhkan kredibilitasnya pasca masa pemerintahannya.

Jika sosok Jokowi ingin ditulis sejarah dan akan diingat oleh para generasi mendatang sebagai presiden yang memajukan pembangunan infrastruktur, revolusi mental, dan mementingkan pendidikan karakter, maka akhirilah masa kedudukan presiden dengan *khusnul khotimah*.

Namun, jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu dipercaya dan dia benar-benar menyetujuinya, maka sejarah akan mengingat bahwa Jokowi adalah presiden yang rakus kuasa.

Penting diingat bahwa isu presiden tiga periode merupakan manuver politik kelompok tertentu yang sangat bernaflu menguasai negara ini. Wacana tersebut bagian dari cermin kebobrokan yang diakukan pihak-pihak tak bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan dari kerusakan demokrasi.

Isu ini sudah terlalu basi karena kerap didaurulang pada setiap akhir masa presiden yang telah menjabat dua periode, seperti halnya pada masa Presiden SBY. Sayangnya, berkali-kali isu ini “digoreng”, berkali-kali pula publik menolaknya secara lantang. Sebab, wacana ini terlalu berat untuk diusulkan karena harus melalui rapat amandemen UUD 1945 di Sidang MPR.

Selain itu, wacana ini juga dianggap narasi yang mengkhianati konstitusi dan semangat Reformasi. Terakhir, jika isu benar-benar menjadi bahan persidangan yang diselipkan di ruang rapat MPR, maka satu kaki kita sebenarnya memberikan jalan kepada langgengnya pemerintahan oligarki, absolut dan totaliter.





MENOLAK MANUVER PRESIDEN TIGA PERIODE

Wacana penambahan masa jabatan selalu menjadi isu yang disuarakan di setiap periode kedua kepemimpinan presiden akan berakhir. Manuver politik ini dianggap sangat “basi” karena seringkali “didaur ulang”. Banyak pihak tak menyetujui diskursus ini karena mengabaikan peran perkaderan di tubuh partai politik.

Jika dulu ada usulan dari Ruhut Sitompul, politikus Partai Demokrat – telah beralih jadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) – untuk menambah jabatan Presiden SBY. Sekarang giliran Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari yang mendukung penambahan masa jabatan Presiden Jokowi.

Hal ini dilakukan Qodari sebagai upaya agar Jokowi kembali berpartisipasi dan memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya itu, Qodari pun sudah ‘mencomblangkan’ Prabowo Subianto, mantan calon presiden saingan Jokowi pada Pilpres 2019, sebagai calon wakil presidennya.

Menurutnya, sebagaimana dikutip dari sinier *Mata Najwa* pada Kamis (18/3), Jokowi dan Prabowo adalah sosok ideal pemimpin negeri yang didamba-dambakan. Bersatunya kedua tokoh tersebut, dianggap akan mampu menurunkan secara signifikan polarisasi antara pendukung keduanya.

Berkaca pada Pilpres di Amerika Serikat yang lalu, Qodari tak menginginkan polarisasi berujung kekerasan hingga kematian yang terjadi di negeri Paman Sam tersebut

terulang di Indonesia nantinya.

Bersama dengan Timothy Ivan dan Baron Danardono, Qodari sudah memulai mengampanyekan gagasannya dengan mendirikan Sekretariat Nasional Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada 19 Juni 2021. Hal ini merupakan langkah awalnya untuk mendeklarasikan Komunitas Jokpro 2024 yang secara resmi baru akan diluncurkan lima bulan mendatang.

Sejumlah nama politisi seperti Arief Puyuno dari Gerindra, Efendi Simbolon dari PDIP, dan Viktor Bungtilu Laiskodat dari Partai Nasdem pun turut mendukung wacana penambahan masa jabatan presiden.

Bahkan, Arief Puyuno mengklaim lebih dari 85% masyarakat akan setuju jika Jokowi menjabat selama tiga periode. Sebab, menurutnya kebijaksanaan dan kepiawaian Jokowi dalam pemerintahan masih dibutuhkan.

Kalangan warga sipil pun turut ambil peran, di Nusa Tenggara Timur pada 22 Juni 2021 sudah digagas komite referendum pengubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) secara terbatas. Mereka menganggap bahwa pengusulan perubahan masa jabatan presiden dari maksimal dua periode menjadi tiga periode adalah kontribusi yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ramai-Ramai Menolak

Dukungan wacana tiga periode kepemimpinan Jokowi yang masif tak serta merta dapat ditafsirkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menyepakatinya. Secara garis besar, masih banyak partai politik, politisi, dan elemen masyarakat yang menolak usulan tersebut.

Bahkan, Presiden Jokowi – selaku tokoh yang diharapkan menjabat kembali – enggan menjabat tiga periode meskipun sudah banyak didukung.

Masih teringat pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu pada jumpa pers di Istana Negara (2/12/2019). “Presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga menurut saya: satu, ingin menampar muka saya; yang kedua, ingin cari muka padahal

“Jokowi dan Prabowo adalah sosok ideal pemimpin negeri yang didamba-dambakan. Bersatunya kedua tokoh tersebut, dianggap akan mampu menurunkan secara signifikan polarisasi antara pendukung keduanya.”

M. Qadari
Direktur Eksekutif Indo Barometer



saya sudah punya muka; yang ketiga, itu menjerumuskan! Gitu aja,” kata Jokowi.

Adapun selaku partai pengusung, PDIP melalui Ahmad Basarah juga menyebutkan bahwa gagasan tiga periode masa jabatan presiden amatlah jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP, entah di MPR maupun internal partai. Ahmad Basarah juga menjelaskan bahwa tatkala ada usulan tersebut, PDIP siap tarik diri dari agenda tersebut.

Kini, sejumlah partai koalisi di lingkaran pemerintah dan oposisi seperti Golkar, PKB, PPP, PAN, Gerindra, Partai Ummat, Partai Demokrat, dan PKS juga serempak menolak wacana penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode tersebut.

Kendati memungkinkan, perubahan UUD NRI 1945 untuk menambah masa jabatan presiden akan dianggap terlalu mempermainkan konstitusi dan mengedepankan kepentingan orang per orang saja.

Mendukung pendapat ini, dari laman *Carapandang.com*, Senin (21/6), Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid pun mengomentari terkait wacana presiden tiga periode tersebut.

“Peresmian Seknas untuk memajukan Jokowi menjadi Calon Presiden tiga periode merupakan perilaku inkonstitusional karena bertentangan dengan spirit dan teks konstitusi UUD NRI 1945 yang berlaku di Indonesia saat ini,” jelas Hidayat Nur Wahid.

Begitupun dengan dengan pendapat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dia memperingatkan bahwa terlalu lamanya masa kepemimpinan akan cenderung pada keadaan dan kepemimpinan yang otoriter.

“Sebaiknya masa jabatan presiden

“Sebaiknya masa jabatan presiden cukup maksimal dua periode. Masa jabatan lebih dari dua periode bisa mengarah kepada status quo dan kepemimpinan yang cenderung otoriter”,

Abdul Mu’ti,
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah



cukup maksimal dua periode. Masa jabatan lebih dari dua periode bisa mengarah kepada status quo dan kepemimpinan yang cenderung otoriter”, terang Abdul Mu’ti.

Namun demikian, seperti peribahasa “dilambai tak nampak, diseru tak dengar”, Qodari masih tak acuh terhadap nasihat maupun penolakan tiga jabatan presiden dari sejumlah politisi dan partai politik. Menurutny, *politician where the voters are* (politisi itu mengarah sesuai dengan apa yang jadi arah pemilih), sehingga ia hanya akan fokus mengkampanyekan gagasannya pada masyarakat luas.

Hikmah di Balik Batasan Dua Periode

Tak seperti Orde Lama dan Orde Baru, dewasa ini wacana penambahan masa jabatan presiden akan terwujud hanya jika Pasal 7 UUD NRI 1945 diubah melalui amandemen. Artinya, minimal sepertiga jumlah anggota MPR harus mengusulkan perubahan pasal tersebut untuk kemudian

ditindaklanjuti dalam Sidang Istimewa MPR yang sekurang-kurangnya harus dihadiri dua pertiga anggota MPR.

Jika sidang tersebut menghasilkan kesepakatan oleh lebih dari 50 persen ditambah satu orang anggota MPR, maka perubahan akan diterima. Namun jika tidak, maka perubahan tidak akan terjadi.

Kesulitan dalam mengubah UUD NRI 1945 tersebut adalah bukti bahwa ada kehendak reformasi yang ingin menjaga bangsa Indonesia dari kesalahan yang terjadi pada era-era sebelumnya.

Adagium yang sering diontarkan Lord Acton “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung pada penyimpangan, semakin absolut kekuasaannya, maka akan semakin besar penyimpangannya) dalam lintasan sejarah telah terbukti, sehingga bangsa Indonesia kini tak ingin terjerumus pada lubang yang sama.

Nabil

WACANA MENGKHIANATI AMANAT REFORMASI

Reformasi 1998 mengamanatkan bangsa Indonesia untuk terbebas dari praktik otoritarianisme. Salah satu upaya politik yang diasumsikan dapat jatuh ke kubangan pemerintahan totaliter yaitu adanya manuver perpanjangan masa pemerintahan menjadi tiga periode.

Wacana ini sebenarnya sudah terlalu basi, karena sudah sering disuarakan sejumlah pihak tak bertanggungjawab. “Modus operandinya” biasa dilakukan atas nama rakyat atau amanah kuasa yang belum ditunaikan.

Padahal, sesungguhnya, isu tersebut dilempar ke publik dengan tujuan ingin mencari muka di hadapan presiden. Pihak-pihak yang menggaungkan wacana ini juga merupakan kelompok yang memang berada di lingkaran relawan presiden.

Meski kadang dilakukan atas dasar kesimpulan sebuah riset, namun sangat mungkin wacana tersebut disebar dengan tujuan mengetes suara publik. Nyatanya, sangat banyak pihak terutama dari pegiat demokrasi yang menolak isu tidak produktif tersebut. Mereka menyebut wacana ini berpotensi mematikan demokrasi, melanggengkan rezim absolut dan mengingkari amanat Reformasi.

Pihak-pihak tertentu yang belakangan mengeluarkan manuver politik untuk mengegolkan perpanjangan masa pemerintahan



presiden menjadi tiga periode tersebut “tengah mimpi di siang bohong”. Dampak negatifnya akan lebih banyak dibanding dampak positif yang diakibatkannya.

Pasalnya, sebagaimana Reformasi, musuh utama bangsa ini adalah kediktatoran. Jadi, jika ada pihak-pihak tertentu yang memaksakan ide perpanjangan periode kedudukan presiden, itu akan merusak semangat Reformasi.

Sangat mungkin mereka hanya gerombolan tak bertanggungjawab yang ingin mengambil untung jika proses demokratisasi ini mengalami kebobrokan.

Para aktivis dari berbagai elemen sosial menyoal kemunculan wacana tersebut dengan menilainya sebagai kemunduran berdemokrasi. Kran demokrasi yang sudah dibuka dengan keringat dan darah perjuangan

mahasiswa dan para aktivis 1998 jangan sampai ditutup kembali dengan pragmatisme kelompok tertentu yang haus kuasa.

Reformasi sebagai bukti perjuangan rakyat melawan rezim otoriter harus terus diingat bahwa masa kedudukan presiden lebih dari 10 tahun dapat membuka peluang korupsi dan membangun rezim yang absolut.

Manuver presiden tiga periode, perpanjangan periodisasi jabatan presiden, atau pemilihan presiden dan wakil presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah cara-cara berpolitik yang menciderai proses demokratisasi di Indonesia. Menurut Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, wacana-wacana tersebut dapat menjerusmuskan negara ini ke absolutisme kekuasaan.

“Jika manuver presiden tiga periode

dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR, maka kita akan kembali ke absolutisme kekuasaan seperti di masa Orde Baru,” jelas Usman, dalam diskusi bertajuk *Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, Ahad (27/6).

Kemunculan wacana perpanjangan masa kepemimpinan presiden ini mengemuka seiring adanya rencana pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan kembali peran MPR. Namun, manuver ini tidak akan berjalan mulus mengingat dampaknya yang lebih serius. Selain dapat melanggengkan model pemerintahan totaliter yang mematikan demokrasi, isu ini juga akan menyumbat hasrat kuasa para politikus dari partai-partai politik.

Ketua Tim Kerja Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) Jimly Assiddiqie menjamin bahwa amandemen UUD 1945 tidak akan merembet ke isu-isu yang lain. Perubahan pasal-pasal dalam amandemen UUD 1945 baru bisa dilakukan jika ada yang mengajukan sebanyak sepertiga dari anggota MPR dan dihadiri oleh minimal dua per tiga dari jumlah anggota MPR, serta setiap putusan harus disetujui minimal 50 persen ditambah 1 dari seluruh anggota MPR.

Pemerintahan yang totaliter hanya akan dikuasai satu aktor, yang kuat secara kapital, pengaruh politik dan militer, sehingga dalam mengelola negara yang besar ini, hanya akan diatur oleh beberapa orang dari kelompoknya sendiri. Jadi, wacana presiden tiga periode tersebut sangat mungkin akan menjerumuskan bangsa ini kembali pada masa Orde Baru.

“Kita kan punya pengalaman yang sangat cukup bagaimana masa

jabatan presiden dipegang oleh satu orang dalam jangka waktu yang sangat lama selama Orde Baru 32 tahun. Makanya salah satu fokus isu ketika reformasi adalah bagaimana membatasi masa jabatan presiden,” ucap Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani.

Merugikan Partai Politik

Ekses negatif yang juga akan muncul bila perpanjangan masa periode kepemimpinan presiden menjadi tiga periode direalisasikan adalah matinya sistem perkaderan di seluruh partai politik. Setiap partai politik senantiasa menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin, namun jika aktor politik di negara ini hanya dikuasai satu orang maka peran partai politik menjadi lemah.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, pihak yang paling dirugikan dari manuver presiden tiga periode ini adalah partai politik. Dalam hal perkaderan, partai politik memiliki sistem yang jelas dan terukur dalam mempersiapkan kader-kadernya menjadi pemimpin di pemerintahan lokal dan nasional, tapi jika kuasa negara dikendalikan oleh pemerintahan yang absolut maka sistem perkaderan partai akan tersumbat.

“Partai politik sebenarnya memiliki fungsi utama merekrut kader dan mempersiapkan anggotanya menjadi pemimpin bangsa ke depan. Sementara untuk maju ke dalam ruang kepemimpinan ini terbatas, kan justru akan merugikan bagi partai politik itu sendiri,” kata perempuan yang akab disapa Ninis tersebut, Rabu (23/6).

Jadi, jika mau kritis sesungguhnya wacana tersebut justru akan

mendelegitimasi peran partai politik. Tidak hanya akan membuat sistem perkaderan menjadi buntu, tetapi juga bergaining partai politik menjadi berkurang karena kendali sektor politik hanya dikuasi dari kubu pemerintah.

Ekses politik yang ditimbulkan akan merembet ke banyak hal, misalnya, ekspresi berpendapat juga tidak akan sedemokratis sekarang. Sebab, pemimpin yang menerapkan model pemerintahan totaliter akan memberi batasan terhadap ekspresi setiap individu atau kelompok di ruang publik.

Amandemen Pasal 7 UUD 1945 yang dilakukan pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, secara jelas telah mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden bisa dipegang selama dua periode berturut-turut, yaitu 10 tahun, oleh presiden yang sama. Jadi, jika ingin melakukan perombakan terhadap pasal tersebut, maka harus dilakukan melalui amandemen di MPR.

Meski begitu, sudah menjadi tugas utama bagi pemerintah, partai politik dan seluruh *civil society* di Indonesia untuk mengawal isu ini agar tidak terselip dalam rencana amandemen di MPR.

Sebab, jika usulan ini keluar di rapat sidang MPR dan menjadi polemik yang berkepanjangan, maka wacana ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengacaukan proses demokratisasi yang sedang berjalan baik ini. Partai politik mesti bertindak tegas dengan menolak manuver tersebut jika keberadaannya ingin tetap berkesinambungan dan tidak mengalami nasib yang sama seperti sejumlah partai yang eksis di masa Orde Baru. **Nafik**



MANUEVER PRESIDEN 3 PERIODE

Wacana Presiden 3 Periode kembali disuarakan, baru-baru ini muncul Komunitas Jokowi-Prabowo (JakPro) 2024 dengan meresmikan Sekretariat Nasional (Seknas) pada Sabtu 19 Juni 2021. Komunitas Relawan ini mendorong agar Jokowi berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2024.

Jauh-jauh hari Presiden Jokowi secara tegas menolak wacana tersebut. Dirinya akan menjalankan amanah konstitusi yakni masa jabatan presiden maksimal 2 Periode. Presiden juga menilai pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya.



Peresmian Seknas untuk memajukan Jokowi menjadi Calon Presiden tiga periode, merupakan perilaku inkonstitusional karena bertentangan dengan spirit dan teks konstitusi UUD NRI 1945 yang berlaku di Indonesia saat ini

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid



Sebaiknya masa jabatan presiden cukup maksimal dua periode. Masa jabatan lebih dari dua periode bisa mengarah kepada status quo dan kepemimpinan yang cenderung otoriter

Sekum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu'ti



Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode

Presiden RI, Joko Widodo





TES WAWASAN KEBANGSAAN:

DRAMA AKHIR PELEMAHAN KPK

Bola panas polemik pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan terus bergulir. TWK dianggap sebagai bagian rangkaian pelemahan KPK oleh sejumlah pihak-pihak tertentu sejak lama. Dengan tidak lolos TWK, mereka dicap anti-Pancasila, pendukung Taliban dan radikal.

Sebanyak 75 pegawai KPK mempermasalahkan soal TWK. Pasalnya, beberapa pertanyaan dinilai tak wajar, seperti mempertanyakan perihal doa qunut dan permasalahan pribadi. Hal itu terbongkar setelah beredarnya Surat Keputusan (SK) terkait pembeastugasan 75 (sekarang menjadi 51) pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Beberapa di antaranya yakni Penyidik Senior KPK Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.



Sebab itu, pada Senin (24/5), mereka melaporkan para pimpinan KPK kepada Komnas HAM. Mereka datang ke kantor lembaga perlindungan HAM tersebut dengan didampingi sejumlah aktivis, seperti Asfinawati (Direktur YLBHI), Arief Maulana (LBH Jakarta), dan LBH Muhammadiyah.

Komnas HAM bertindak cepat dengan menindaklanjuti laporan tersebut. Komnas HAM juga telah memeriksa sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK, dan telah menerima tiga bundel dokumen setebal 650-an halaman. Dalam konferensi pers, Komisioner



Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam, menyebut pihaknya telah mendapatkan sejumlah informasi penting di antaranya terkait proses TWK berlangsung, lahirnya prosedur hukum, substansi pertanyaan selama *interview* TWK, tugas, fungsi, dan model kerja, serta konteks peristiwa ini terjadi.

Melanggar Hak Konstitusional

Adanya tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN merupakan problematika tersendiri. Sebab, TWK hanya ditujukan untuk pengadaan ASN/CPNS, tidak bagi pegawai alih status. Berdasarkan PP No 15 tahun 2011 tentang alih status TNI dan POLRI menjadi ASN, tidak ada TWK untuk pegawai alih status. Lebih konkrit dalam Peraturan Pemerintah (PP) manajemen PNS menyebut secara jelas ketiadaan TWK bagi pegawai alih status.

Disinyalir, TWK merupakan tafsir pribadi dari Pimpinan KPK, terutama Firli Bahuri. Padahal, secara konstitusi, menurut pasal 4 PP No 15 tahun 2011 ada lima tahapan yang sama sekali tidak ada TWK. Hal ini dianggap

melanggar hak atas perlakuan yang tidak adil dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 38 ayat (2) UU HAM.

Dalam aturan UU maupun PP, hingga peraturan KPK, tidak disebutkan bahwa lulus TWK adalah syarat bagi pegawai jika ingin diangkat menjadi ASN. Tindakan tersebut diduga melanggar HAM karena tidak sesuai dengan jaminan konstitusi yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Secara jelas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi.

Tim kuasa hukum Asfinawati mengungkapkan lima dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status

“Kita tahu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan tendensius, di mana jawaban yang sama juga dijawab oleh pegawai yang lain, tapi mereka lulus, yang ini enggak lulus.”

Asfinawati, Tim kuasa hukum



pegawai lembaga antirasuah tersebut menjadi PNS. *Pertama*, kata Asfi, adalah dugaan pelanggaran di balik pembatasan yang termuat dalam TWK; *Kedua*, perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu menyebut, ada perlakuan tak adil terhadap sesama peserta TWK yang mendapat soal yang sama, namun mendapat hasil yang berbeda.

“Kita tahu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan tendensius, di mana jawaban yang sama juga dijawab oleh pegawai yang lain, tapi mereka lulus, yang ini enggak lulus,” ucap Asfinawati.

Ketiga, pelanggaran terhadap serikat berkumpul. Menurut Asfi, wadah pegawai KPK -organisasi internal- para pegawai lembaga antirasuah, telah menjadi target sejak revisi UU KPK 2019. Meski hasil revisi tak mengatur soal TWK, namun kata Asfi, nyaris semua pegawai di WP KPK dinyatakan tak lulus. Mereka terutama para pengurus harian, seperti ketua, wakil ketua, maupun sekjen.

Keempat, pelanggaran terhadap pembela HAM Novel Baswedan. Laporan Komnas HAM menyebut Novel sebagai pembela dalam kasus penyiraman air keras 2017; *Kelima*, diskriminasi terhadap perempuan. Menurut Asfi, sejumlah pertanyaan dalam TWK mengandung unsur pelecehan seksual terhadap

perempuan. Bahkan ada pegawai perempuan menangis usai mengikuti tes akibat pertanyaan tersebut.

Disebut Anti Pancasila

Salah satu pegawai yang tak lolos TWK Artining Putri mengatakan adanya praktik kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan TWK. Pegawai KPK yang tak lolos TWK dianggap anti pancasila dan tidak memiliki wawasan kebangsaan.

“Inibukan persoalan 75 pegawai KPK yang sedang merengek karena tidak lolos TWK. Tapi ini soal tanggungjawab bersama untuk memastikan pemberantasan korupsi tetap ada di jalur yang tepat,” ujar Artining dalam diskusi bertajuk *Mengurai Kontroversi TWK*, yang disiarkan melalui akun resmi YouTube *Indonesia Corruption Watch*, Minggu (30/5).

Adanya indikasi nama pegawai tertentu sudah ditandai sebagai tidak pancasilais, liberal semakin kentara mengingat 75 pegawai (sekarang menjadi 51) adalah orang-orang yang getol dalam pemberantasan korupsi. Menurut Penyidik KPK yang lolos TWK Mu’adz Fahmi, pegawai KPK yang tidak lolos sangatlah pancasilais.

“Mereka ini justru orang-orang yang getol betul dengan pemberantasan korupsi. Ada yang salah disikat, tidak peduli atasan salah akan dilawan. Karena yang dibela adalah Undang-

Undang, bukan *person to person*,” jelas Mu’adz Fahmi.

Labelisasi sebagai pihak yang anti Pancasila, pendukung Taliban dan radikal juga menjadi stigma bagi para pegawai yang tak lolos TWK. Labelisasi ini dinilai identik dengan cara-cara Orde Baru untuk melumpuhkan lawan politik. Stigma tersebut sangat berbahaya karena bisa menjadi alat diskriminasi. Melalui stigma ini, ada upaya pelemahan KPK dari internal sendiri.

“Proses kriminalisasi terhadap pegawai KPK yang getol terhadap pemberantasan korupsi digunakan untuk memukul keras KPK dari dalam,” tegas Mu’adz Fahmi.

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, upaya pelumpuhan KPK merupakan serangkaian upaya yang terkait dengan sebelumnya, yaitu revisi UU KPK. Apalagi, isi dari TWK yang diajukan kepada pegawai KPK tidak mencerminkan nilai kebangsaan yang tertuang dalam konstitusi negara ini.

Busyro menambahkan, seharusnya materi atau pertanyaan yang diajukan dalam tes yang disebut ‘wawasan kebangsaan’ itu harus mampu mengamalkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, terutama paragraf keempat yang menyebutkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia harus mampu melawan segala bentuk penjajahan, mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial, dan meneguhkan komitmen kemanusiaan, kebertuhanan, dan kesejahteraan sosial.

“KPK dibombardir isu radikalisme, Taliban dan sebagainya. Padahal di KPK, pegawai antar iman tidak pernah ada masalah mengenai perbedaan keyakinan. Jadi, kerukunan beragama di KPK tidak ada masalah,” ucap Busyro. **Ika**

LAPORAN KHUSUS



KEJANGGALAN ALIH STATUS PEGAWAI KPK

Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada 2019 hingga saat ini masih berbuntut polemik. Pelaksanaan alih status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai janggal.

Pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pelaksana ramai dicecar. Kendati politisi, pakar, mahasiswa, akademisi, aktivis anti korupsi, bahkan presiden pun sudah mengingatkan, kedua lembaga tersebut seakan 'tutup kuping'. Layaknya peribahasa

'terapung tak hanyut, tenggelam tak basah,' masyarakat yang bingung bukan kepalang, mulai gelisah menanti kejelasan duduk permasalahan ini.

Berikut himpunan kejanggalan alih status kepegawaian KPK, mulai dari awal hingga kabar terkini yang dirangkum tim *Majalah Carapandang*.

1. Dugaan Pasal Selundupan dalam Peraturan Komisi

Ketua KPK Firli Bahuri diduga menyelundupkan assesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) lewat Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom). Belakangan, TWK dianggap sebagai instrumen penilaian yang aneh dan tak ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi.

Dugaan terhadap mantan ajudan era Wakil Presiden Boediono ini, diindikasikan saat beberapa pegawai KPK melaporkan Firli ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam laporannya, para pegawai menceritakan bahwa selama proses penyusunan dan sosialisasi draf Perkom pada akhir Agustus hingga November 2020 tidak pernah dibahas

**“TWK dapat
dibuktikan secara
ilmiah, tetapi perlu
dipilah aspek
mana saja yang
bisa diungkap ke
publik dan mana
yang tidak bisa...”**

Hamdi Muluk, Pakar Psikologi
Politik Universitas Indonesia

masalah TWK.

Pengaturan TWK baru muncul saat dilaksanakan rapat harmonisasi draf Perkom di Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Januari 2021 dan mulai diberlakukan sehari setelahnya. Menurut para pegawai tersebut, Ketua KPK tak perlu repot-repot datang sendiri ke acara tersebut, sebab biasanya cukup melalui Sekjen, Biro Hukum, dan Biro Sumber Daya Manusia KPK. Namun, entah mengapa orang nomor satu di KPK ini ‘turun gunung’.

Terhadap permasalahan ini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufroon membantahnya. Seusai konferensi pers pada Kamis (10/6), ia menjelaskan draf rancangan Perkom telah disosialisasikan sejak 16 November 2020 di portal KPK. Selain itu, Nurul Ghufroon pun menambahkan bahwa TWK – meski dianggap bermasalah – memiliki landasan yang kuat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020.

2. Dugaan Berlaku Surut Dokumen KPK dan BKN

Sebagai platform mandiri

yang menerima informasi seputar kepentingan publik, Tim IndonesiaLeaks akhir-akhir ini menerima dua dokumen seputar alih status kepegawaian KPK. Satu di antaranya adalah Nota Kesepahaman Nomor 97 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola antara Sekjen KPK dengan Kepala BKN. Sedang yang lainnya adalah Kontrak Perjanjian Swakelola tentang Penyelenggaraan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua dokumen tersebut dianggap janggal lantaran tanda tangan kesepakatan dua belah pihak baru dibubuhkan pasca muatan perjanjian terlaksana. Nota Kesepahaman yang menjadi awal dimulainya perjanjian pelaksanaan TWK oleh KPK dan BKN baru ditandatangani pada 8 April 2021. Padahal, pelaksanaannya sudah berlangsung dari 9 Maret hingga 9 April 2021.

Perihal dokumen yang kedua, yakni kontrak perjanjian. Indikasi yang menunjukkan kontrak tersebut berlaku surut adalah tanggal pembuatan kontrak. Jika mengutip M Syaifuddin (2016) dalam *“Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik”*, seharusnya nota kesepahaman (MoU) berkedudukan sebagai ikatan awal yang mendahului perjanjian. Sehingga nota kesepahaman lazimnya berada mendahului perjanjian atau kontrak. Namun, pada persoalan ini, kesepakatan perjanjian – dianggap dibuat pada 27 Januari 2021 – mendahului nota kesepahaman.

Kendati tak menjawab langsung pada pokok persoalan, hari Kamis (10/6) Nurul Ghufroon mengkonfirmasi perihal dua dokumen tersebut. Ia menyatakan “Jadi MoU yang dikatakan

backdate (berlaku surut) itu sebenarnya memang ditandatangani, tapi tak pernah dilaksanakan”.

Menurutnya, nota kesepahaman dan kontrak tersebut tak lagi berlaku, sebab keduanya dibentuk hanya dengan tujuan legalitas pembiayaan di KPK. Namun, belakangan ia menyadari bahwa pembiayaan dibebankan sepenuhnya pada BKN, sehingga KPK tak lagi memerlukannya.

3. Pertanyaan *Nyeleneh* Wawancara TWK dan Label Tak Pancasilais

Selain aspek legalitas, TWK juga dianggap bermasalah pada aspek materinya. Beragam pertanyaan tes wawancara dinilai tak relevan, *nyeleneh*, bahkan menyerang privasi dan hak beragama individu. Sebagai instrumen yang juga menilai keberpihakan ideologi, mereka yang tak lulus merasa martabat dan kesetiaannya terhadap NKRI dihina. Sebab, adanya pegawai KPK yang tak lulus TWK bisa jadi dianggap tidak Pancasilais.

Rizka Anung Nata, salah satu Kepala Satuan Tugas Penyidik di KPK, sebagaimana dikutip dari acara Mata Najwa pada Kamis (27/5) di kanal Youtube-nya, menceritakan salah satu pertanyaan yang dianggap melanggar hak keberagamaan. Rizka menjelaskan bahwa seorang asesor menanyakan tentang mengapa ia *mem-follow* akun pendakwah yang kerap kali mengkritik pemerintah. Menurutnya, pertanyaan tersebut tak ada kaitannya sama sekali dengan tugasnya sebagai penyidik.

Selain masalah hak beragama, Rizka pun menjelaskan adanya pertanyaan asesor yang menjebak dirinya agar mengakui perbuatan tercela. Seorang asesor bertanya *“sama seperti anda dulu – di tempat dinas yang lama, anda kan pasti sering melakukan perintah-perintah yang dari pimpinan untuk menghentikan*

atau membelokkan suatu kasus?”.

Tak jauh berbeda dengan Rizka, Ita Khoiriah, seorang pegawai perempuan di Humas KPK, menyebutkan bahwa asesor pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan tak patut. Contohnya, masalah status perkawinan, apakah punya pacar? Apa saja yang dilakukan saat pacaran? Juga aliran agama apa yang dianut? Atas pertanyaan-pertanyaan yang dianggap menyerang kehormatannya ini, Ita telah melapor ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Terhadap permasalahan ini, Hamdi Muluk, seorang pakar psikologi politik Universitas Indonesia menuturkan *“TWK dapat dibuktikan secara ilmiah, tetapi perlu dipilah aspek mana saja yang bisa diungkap ke publik dan mana yang tidak bisa...”*. Menurutny, ragam pertanyaan TWK wajar diberikan untuk mengukur kecenderungan ideologi seseorang. Mengingat amanat Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 menyaratkan agar pegawai KPK yang akan dialihstatuskan menjadi ASN harus setia pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

4. Hasil TWK Abai Amanat Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Setelah melewati proses panjang, akhirnya pada 5 Mei 2021 diumumkan hasil TWK secara langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri. Dari 1.351 pegawai, 1.274 orang di antaranya dianggap lolos (memenuhi syarat), 75 orang tidak lolos (tidak memenuhi syarat), dan dua orang lainnya tidak hadir saat wawancara.

Layaknya tes pada umumnya, entah lolos dan tidaknya seseorang adalah hal yang lumrah. Sebab, suatu institusi – terlebih lembaga negara – memiliki

standar kualifikasi dan prioritas kuota kepegawaiannya masing-masing. Namun lain persoalan, jika sejumlah nama terkenal yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi dinyatakan tidak lolos. Apalagi mereka yang tidak lolos, adalah sejumlah nama yang juga menangani kasus-kasus ‘besar’.

Asumsi publik untuk menyatakan bahwa mereka yang tidak lolos adalah orang yang sudah diincar sejak awal sulit dihindari. Terlebih, nama-nama seperti Herru Muryanto (menangani kasus pelanggaran kode etik Firli

mengetahui penargetan tersebut, bahkan mengasosiasikan daftar nama tersebut dengan ‘bioskop 21’.

Permasalahan ini pun tak luput dari pandangan sejumlah tokoh nasional mulai dari Busyro Muqoddas, Emil Salim, Alissa Wahid, bahkan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5) bahkan menjelaskan:

“Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi

“Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN ... maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun ...”.

Joko Widodo, Presiden RI



Bahuri), Andre Dedy Nainggolan (menangani kasus korupsi dana Bansos Covid-19), Rizka Anung Nata (menangani kasus Harun Masiku) dan lain sebagainya turut masuk di dalamnya.

Menurut salah satu penyidik yang juga tidak lolos TWK Harun Al Rasyid, Ketua KPK sudah jauh-jauh hari menargetkan 21 orang yang getol dalam pemberantasan korupsi dan sering protes terhadap kebijakan pimpinan. Terhadap hal ini, Farid Andhika selaku Sekretaris Jenderal Wadah Kepegawaian KPK yang turut

KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes”.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo pun tak lupa mengutip pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019:

“Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN ... maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun ...”. **Nabil**



FIRLI MELEMAHKAN KPK?

Keterpilihan Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuai kontroversi sejak awal. Selain rekam jejak yang dipertanyakan, langkah dan kebijakannya setelah menjabat justru dianggap melemahkan KPK dari dalam.

Jum'at (13/9/2019), dini hari, Firli terpilih secara aklamasi menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Dia meraih suara terbanyak dari hasil *voting* 56 anggota Komisi III DPR RI.

Sebelum aktif di KPK, karir Firli di kepolisian tampak bersinar. Sejumlah jabatan mentereng pernah didudukinya, seperti menjadi Kapolres Lampung Timur (2001), Kasat III Ditreskrim Polda Metro Jaya (2005), Kapolres Kebumen dan

Kapolres Brebes (2006 dan 2007), dan Wakapolda Banten (2014). Tiga tahun kemudian, Firli dipromosikan menjadi Kapolda NTB.

Tak berselang lama, Firli ditugaskan sebagai Deputy Penindakan KPK pada 2018. Di lembaga inilah, kiprah Firli mulai disorot publik, karena melakukan pelanggaran etik berat.

"Kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat," kata Penasihat KPK Tsani Annafari dalam konferensi

pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/9/2019).

Dia menambahkan, ada tiga peristiwa yang dilakukan Firli sehingga menjadi pelanggaran etik berat, yaitu: *Pertama*, pertemuan Irjen Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) pada 12 dan 13 Mei 2019. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi PT Newmont yang menyeret Pemerintah Provinsi NTB; *Kedua*, Firli melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018; *Ketiga*, bertemunya Firli dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Meski sudah ada klarifikasi, namun pelanggaran etik tersebut tetap mencoreng karir Firli sebagai Deputy Penindakan di KPK. Tentulah ini merupakan rekam jejak yang sangat buruk. Apalagi, Firli kini tengah menduduki kursi ketua KPK.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rahman. Dia menilai, penanganan korupsi pasca Reformasi jauh lebih baik dibanding yang terjadi pada masa Orde Baru. Hal itu lebih disebabkan oleh dukungan dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap KPK.

“Sayangnya, semua itu hilang ketika adanya revisi UU KPK dan terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK”, ungkap Zaenur.

Kontroversi Kebijakan Firli

Hampir tiga tahun memimpin KPK, Firli kembali menuai kontroversi. Kebijakan yang ia keluarkan adalah alih status anggota KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kejanggalaan dari kebijakan tersebut yakni dipaksakannya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada anggota KPK. Firli menyebut banyak Taliban di KPK. Akhirnya, setelah TWK dilaksanakan, keluar surat keputusan untuk menonaktifkan 75 pegawai (belakangan menjadi 52 pegawai) KPK.

SK yang dikeluarkan itu tertanda ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin. Dalam SK penonaktifkan 75 pegawai yang tidak lolos TWK memuat empat poin. *Pertama*, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur

Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. *Ketiga*, menetapkan lampiran dalam keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. *Keempat*, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salah satu pegawai yang di nonaktifkan setelah dilaksanakan asesmen TWK adalah Novel Baswedan. Penyidik senior KPK tersebut menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal dalam TWK bukan proses yang wajar.

“Ini merupakan upaya untuk menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara,” jelas Novel.

Kebijakan Firli tersebut jelas merugikan banyak pihak. Selain pegawai KPK yang konsisten dalam memberantas korupsi, juga masyarakat Indonesia yang merasakan adanya pelemahan di tubuh KPK.

Lembaga yang didirikan sebagai buah dari reformasi tersebut, kini semakin minim mendapatkan kepercayaan publik. Pimpinan KPK seperti kehilangan integritas di tengah maraknya kasus korupsi.

Integritas Pemimpin KPK

Sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi, KPK sudah selayaknya mempunyai dasar pijakan yang kuat dalam upayanya menjadikan Indonesia bersih dari korupsi. Dasar pijakan yang harus dimiliki pemimpin KPK adalah integritas. Integritas akan mengantarkan seseorang dapat

menjalankan amanat dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Peristiwa di atas adalah potret dari kepemimpinan yang minim integritas. Meski kode etik dan pedoman perilaku KPK sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013, namun tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya berjalan menyimpang. Potensi terjadinya pelanggaran dapat terjadi kapan saja apabila integritas sudah terbeli.

Dalam pengamatan sejumlah pihak, KPK mengalami penurunan. Indeks pemberantasan korupsi di negeri ini mengalami penurunan. Transparency International Indonesia (TII) merilis skor IPK Indonesia 2020 turun menjadi 37 dari skor 40 pada 2019. Peringkat Indonesia melorot dari 85 menjadi 102 dari 108 negara yang diukur IPK-nya. Di negara-negara Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).

Melorotnya IPK menandakan korupsi di Indonesia masih marak terjadi. Banyak elit di negeri ini yang masih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok sehingga berakibat terhadap banyaknya uang rakyat yang dicuri. KPK sebagai lembaga anti rasuah sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi.

Di bawah kepemimpinan Firli inilah masa depan KPK akan ditentukan. Kepercayaan publik terhadap KPK harus diutamakan. Pimpinan KPK harus menjadikan integritas sebagai ruh, spirit, dan modal utama untuk mengemban amanah, sehingga KPK bisa berjalan independen tanpa ada kepentingan yang melemahkan dari dalam. **Aldi**



PILAH-PILIH PANGlima TNI PENGANTI HADI

Nama Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) akhir-akhir ini kian mencuat di bursa calon Panglima TNI menjelang pensiunnya Hadi Tjahjanto pada November mendatang. Sejumlah politisi menganggap Andika lebih mumpuni dibanding dua Kepala Staf Angkatan lainnya. Sedangkan beberapa pengamat meyakini Yudo Margono sosok yang tepat.

Menguatnya nama Andika Perkasa dalam lingkup politisi, seakan menempatkan penunjukan Panglima TNI dilaksanakan secara politis. Meski bukan kewajiban, Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah menjadi isyarat agar jabatan Panglima TNI hendaknya bergiliran. Jika periode lalu Angkatan Darat, periode ini Angkatan Udara, maka seharusnya periode selanjutnya dari Angkatan Laut.

Sumber Dukungan

“Andika memiliki kompetensi Panglima TNI lantaran dua hal yang menjadi keutamaannya. *Pertama*, sejumlah konflik yang terjadi antara Polri dan TNI, khususnya TNI AD, selama dua atau tiga tahun belakangan, dapat diselesaikan hanya jika Panglima TNI berasal dari Perwira Tinggi TNI AD. *Kedua*, dalam rangka *progress* masalah operasi wilayah Papua, Andika memiliki kapasitas operasi teritorial dan intelijen yang

masif,” terang politikus PDIP sekaligus anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, dikutip dari *Kompastv*, Senin (14/6).

Begitu pula sejumlah politikus yang juga anggota Komisi I DPR-RI, seperti Dave Laksono (fraksi Partai Golkar), Fadli Zon (fraksi Gerindra), Riski Aulia (fraksi Partai Demokrat), Syaiful Tamliha (fraksi PPP), dan Sukamta (fraksi PKS) turut menyatakan dukungan pada Andika. Adapun sisanya, yakni fraksi PAN, PKB, dan Nasdem pada Komisi I menyerahkan dan mendukung pilihan Presiden Jokowi siapapun yang ditunjuk.

Secara pengalaman, Andika dianggap paling senior dalam jabatan Kepala Staf Angkatan. Jika KSAL dan KSAU dilantik pada Rabu, (20/5/2020), maka Andika dilantik pada Kamis, (22/11/2018). Terhitung hingga saat ini, Andika telah berpengalaman sebagai KSAD selama dua tahun 6 bulan, sedangkan Yudo Margono dan Fadjar Prasetyo baru menjabat sebagai KSAL dan KSAU selama setahun.

Adapun secara politis, Andika merupakan menantu A.M. Hendropriyono, yakni mantan Kepala Badan Intelijen Negara. Hendropriyono dianggap sebagai sponsor yang akan mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi pada penunjukkan Panglima TNI nantinya.

Saat ini, mertua Andika tersebut gencar dikabarkan melobi presiden untuk suksesi menantunya menjadi Panglima TNI. Sebab, pada 7 Mei 2021, diketahui dari salah satu akun media sosial anaknya, Diaz Hendropriyono, terdapat foto Hendropriyono, istrinya, dan Presiden Jokowi se usai mengadakan pertemuan yang tidak diketahui apa pembahasannya di dalamnya. Spekulasi demi spekulasi mulai bermunculan mengingat selama ini agenda resmi presiden selalu

diketahui awak media.

Namun demikian, serangkaian tanda positif yang disinyalir sebagai kekuatan Andika, tak semata-mata membuatnya luput dari kelemahan. Usianya yang telah menginjak 56 tahun 5 bulan, mengisyaratkan jika ditunjuk menjadi Panglima TNI pada November, maka masa jabatannya hanya akan efektif selama satu tahun lebih sedikit.

Lain halnya dengan Andika Perkasa, KSAL Yudo Margono lebih digandrungi bukan oleh politisi maupun pejabat tertentu dalam lingkaran kekuasaan, tetapi oleh pemerhati dan akademisi. Selain faktor usia yang lebih muda, Yudo dianggap akan mampu membawa perbaikan dan terobosan tertentu dalam bidang pertahanan.

“Keunggulan Yudo Margono sudah terlihat sejak memimpin satgas pencarian pesawat Lion Air JT-160 yang jatuh di perairan laut Jawa 2019,” jelas pemerhati pertahanan dan keamanan nasional sekaligus dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Robi Sugara dilansir dari sinar *Tagar TV* pada Rabu (9/6).

Robi menceritakan, Yudo amatlah sigap dalam mengontak negara-negara tetangga pemilik alat-alat canggih sehingga dapat menemukan korban dan bangkai pesawat dengan cepat. Berbeda dengan kasus jatuhnya pesawat Malaysia MH-370, penanganannya begitu lama, hingga waktu yang ditentukan, puing pesawat dan korban tak kunjung ditemukan.

Robi kembali menegaskan, kapasitas dan kapabilitas seorang Yudo akan sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lalu, dengan penunjukkan KSAL sebagai Panglima TNI nantinya, konflik Laut China Selatan akan menjadi isu yang akan secara konsisten dibahas,

entah sebagai langkah preventif maupun langkah kuratif.

Adapun, menurut Ngasiman Djoyonegoro, sebagaimana dikutip dari *Antaranews* pada Rabu (2/6), Yudo Margono layak menjadi Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto berdasarkan lima alasan. *Pertama*, yakni pengamanan wilayah maritim Indonesia dari perebutan negara lain.

Ngasiman menjelaskan, pertambahan potensi konflik di Laut China Selatan perlu diwaspadai. Penjagaan terhadap wilayah maritim akan menjadi antisipasi dini dalam mempertahankan keutuhan kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan pengamanan wilayah maritim, potensi kejahatan trans-nasional – seperti penyelundupan senjata – akan mudah diantisipasi.

Kedua, sama halnya dengan Robi Sugara, menurut Ngasiman visi Indonesia sebagai poros maritim dunia akan dilanjutkan. Dampaknya akan menjaga identitas kemaritiman Indonesia yang besar, kuat, dan makmur, sehingga harapan besar pemerataan ekonomi pun akan terjadi.

Ketiga, pengalaman Yudo sebagai pemimpin pada Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 (Kogabwilhan 1) menunjukkan bahwa dengan kepemimpinannya mampu mengomandoi tiga matra TNI serta relasi Polri. *Keempat*, atas dasar kepiawaiannya terhadap penanganan Covid-19 dan teknologi kesehatan modern, Yudo dianggap mampu mencegah ancaman *biowarfare* (perang biologi).

Alasan yang terakhir, Yudo akan dianggap pantas menjadi Panglima TNI, sebab loyalitasnya yang tak terbantahkan.

Nabil

Pengangkatan Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank sebagai komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk telah menuai kontroversi. Banyak yang menilai penunjukan Abdee menjadi komisaris sebagai bentuk balas jasa atas keterlibatannya sebagai relawan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.



Sosok Abdee Slank sangat dikenal di industri musik dalam negeri. Selain karena keterlibatannya sebagai gitaris sebuah grup band papan atas, dia juga sukses memproduksi sejumlah grup band dan menjadi juri di ajang kompetisi menyanyi tingkat nasional. Jadi, di dunia permusikan, publik tak perlu meragukan kemampuannya.

Tetapi, dalam dua kali perhelatan Pilpres (2014 dan 2019), ada pemandangan yang tidak biasa dari diri Abdee. Dia menjadi pendukung di garis terdepan dalam kampanye calon presiden Jokowi waktu itu. Dia kerap menjadi narasumber di beberapa televisi, baik sebagai juru bicara Slank maupun juru bicara relawan yang membela Jokowi.

Bahkan, pada saat itu, Slank juga merilis *Salam Dua Jari* yang kemudian menjadi lagu pemenang Jokowi pada Pilpres 2014 dan lagu *Bareng Jokowi*

POLITIK BALAS BUDI RELAWAN JOKOWI

yang menjadi penutup kampanye Pilpres 2019. Jadi, peran Abdee dalam kemenangan Jokowi, sangatlah besar terutama menarik pemilih kaum muda.

Belakangan, muncul spekulasi bahwa pengangkatan Abdee sebagai komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, merupakan balas budi Jokowi kepadanya. Abdee menjadi komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jum'at (28/5). Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, ucapan terima kasih inilah yang menjadi

spekulasi manakala seseorang diangkat menjadi anggota dewan komisaris.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pengangkatan Abdee Slank adalah bentuk terbukanya syarat komisaris di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Selain itu, ia menyebut pemilihan Abdee merupakan upaya perusahaan untuk mengembangkan konten lokal.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai, penunjukan Abdee lebih bernuansa balas budi. Tentu, politik balas



budi itu sebenarnya tidak masalah, jika penunjukannya benar-benar menjunjung tinggi prinsip-prinsip *the right man on the right place*.

Senada dengan Anwar Abbas, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai penunjukan komisaris BUMN tampak diisi orang-orang yang bukan di bidangnya. “Sebaiknya BUMN diisi oleh orang-orang profesional atau pegawai yang sudah mengabdikan lama di perusahaan pelat merah,” kata Ujang.

Kompetensi dan Profesionalitas

Seseorang yang diberikan jabatan dan amanah untuk menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab tertentu, harus memiliki kompetensi teruji sesuai dengan prinsip penugasan. Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki individu dalam melakukan tugas dan pekerjaan di bidangnya.

Di era disrupsi saat ini, sebuah

perusahaan harus bisa *survive* menghadapi tantangan perubahan yang begitu besar. Jika perusahaan tidak bisa beradaptasi, maka seiring berjalannya waktu akan mengalami kerugian. Tak terkecuali PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, perusahaan yang didirikan sejak 1965 ini harus bisa *survive* melakukan terobosan dalam menemukan berbagai inovasi baru.

Untuk mencapai keberhasilan itu, prasyarat utamanya adalah kemampuan kepemimpinan para komisaris. Mulai dari kompetensi teknis, kompetensi non-teknis, serta kompetensi manajerial. Seorang pimpinan juga harus bisa membaca peta dan memitigasi perusahaan supaya mempunyai tujuan yang jelas.

Sebagai sebuah perusahaan pelat merah, Telkom harus mengedepankan kompetensi dalam memilih komisaris. Tidak boleh hanya dengan modal pertemanan, bersikap tidak objektif dengan sekedar bagi-bagi jabatan. Jika demikian yang terjadi, tentu publik tidak bisa berharap banyak dari kemanfaatan yang bisa diberikan perusahaan.

Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, permasalahan yang dihadapi perusahaan pelat merah sangat kompleks. Mengingat BUMN juga sedang terlilit hutang sebesar Rp2.140 triliun pada kuartal III-2020. Sebab itu, dibutuhkan seorang komisaris yang berpengalaman dan berpengetahuan lebih untuk bisa mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, BUMN bisa menjadi pilar utama yang akan mendongkrak perekonomian nasional.

Urgensi Good Governance

Dugaan adanya bagi-bagi jabatan dalam penentuan komisaris

di banyak perusahaan BUMN membuat kepercayaan publik menurun. Harusnya, pemerintah lebih mengedepankan prinsip *good governance* dalam tata kelola BUMN.

Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000, *good governance* memiliki pengertian sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan beragam prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi ruh dan spirit dalam mengelola tata pemerintahan sehingga tidak akan terjadi penyimpangan.

Dalam laporan tahun 2020, Ombudsman menyebutkan, keluhan/laporan pelayanan publik meningkat signifikan. Secara nasional, laporan yang masuk berkisar lebih dari 5000 laporan. Hal ini menandakan belum optimalnya pengelolaan tata pemerintah yang baik. Banyaknya kepentingan yang tidak mengedepankan publik merupakan faktor utama banyaknya keluhan yang masuk ke Ombudsman.

Prinsip tata kelola yang mengedepankan *good governance* harus ditunaikan. Sebab, baik dan buruk pemerintahan suatu negara bisa dinilai dari penyelenggaraan tata kelolanya. Meski banyak dugaan yang menyebut pengangkatan Abdee Slang menjadi komisaris sebagai bentuk balas jasa, tentu tidak akan bermasalah apabila dapat menjalankan amanah sesuai dengan tugas yang diberikan dan tidak menyimpang. Tetapi, pertanyaan serius yang mengemuka, adalah Abdee tak memiliki *track record* dalam pengembangan industri teknologi informasi.

Aldi/Nafik

Pandemi Covid-19 kembali menjadi tsunami yang terus menghantui kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidaksiplinan menerapkan protokol kesehatan menjadi faktor utama infeksi wabah ini kembali merebak. Peran tokoh agama untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat sangat penting.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini kembali meningkat. Angka-angka statistik menunjukkan terjadi peningkatan tajam di berbagai daerah. Melansir data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tercatat ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 21.342 orang. Pasien yang terjangkit Covid-19 di Indonesia kini total mencapai 2.115.304 (Sabtu, 27/6).

Tingginya angka infeksi Covid-19 terjadi akibat minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Apabila ini terus diabaikan, ke depan tentu akan menjadi ancaman yang akan semakin mengambil nyawa orang.

Kita harus belajar dari negara-negara yang masyarakatnya abai terhadap protokol kesehatan. India misalnya, dengan waktu yang relatif singkat badai Covid-19 menghantam India sehingga penanganannya tidak optimal dan mengakibatkan korban berjatuhan. India menempati posisi kedua tertinggi dunia dengan jumlah kasus sebanyak lebih dari 29 juta terinfeksi. Lalu, sebanyak sekitar 27,8 juta sembuh dan 363.097 orang meninggal dunia.



TSUNAMI COVID-19, PERAN TOKOH AGAMA DINANTI

Hal yang serupa terjadi di Indonesia. Meski tidak begitu parah dibanding India, tetapi situasi ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat. Melihat rumah sakit yang dipenuhi pasien Covid-19 dan jumlah tenaga kesehatan yang berkurang membuat mereka kesulitan menangani pasien secara serius.

Di Indonesia, pasien meninggal

dunia akibat Covid-19 telah mencapai 57.138 orang (Sabtu, 27/6). Tentu menjadi peringatan bagi semua untuk tetap waspada dan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Prinsip hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan melalui 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air serta menjaga jarak harus menjadi kebiasaan baru.



Penting diketahui bahwa memakai masker kain berisiko menularkan Covid-19 sebesar 45%. Sedangkan, jika menggunakan masker medis risiko penularan berkurang 75%. Pemahaman tentang protokol kesehatan ini harus selalu dikampanyekan terhadap masyarakat.

Sebab itu, menjadi ikhtiar bersama untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah dalam hal ini senantiasa harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Karena, sesungguhnya yang paling ampuh untuk melawan Covid-19 adalah mendisiplinkan diri sendiri.

Peran Tokoh Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat terutama di Indonesia, tokoh agama dinilai sebagai titik sentral untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran agama yang luhur. Tokoh agama memiliki peran dan fungsi sebagai pemberi informasi, mengedukasi dan sebagai konsultasi.

Melalui berbagai peran tersebut, tokoh agama dipercaya memiliki peran yang sangat baik dalam hal menyampaikan kebijakan pemerintah terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan dan menangkal berbagai informasi hoaks, seperti tidak percaya adanya Covid-19, adanya teori konspirasi Covid-19, dan penolakan terhadap program vaksinasi.

Tokoh agama dinilai juga sebagai suri tauladan di tengah masyarakat. Dalam hal ini tokoh agama harus menjadi ujung tombak untuk mensosialisasikan penanganan Covid-19 kepada masyarakat. Wakil Presiden Indonesia, KH Ma'ruf Amin mengatakan, Perkembangan pandemi di seluruh dunia termasuk di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

"Saya menilai peran para ulama dan pemuka agama sangatlah penting, khususnya dalam upaya pencegahan penularan Covid-19," jelas Ma'ruf.

Tokoh agama dikenal sebagai rujukan masyarakat hendaknya bisa memainkan peran edukasi bagi masyarakat. Jangan malah sebaliknya, memberikan ceramah untuk tidak mempercayai adanya Covid-19 dan menganggap ini bagian dari konspirasi.

Justru yang seperti ini akan membuat rakyat banyak frustrasi, terjebak dalam doktrin yang sesat dan radikal. Tokoh agama harus menekankan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menjadikan

iman sebagai alasan penyangkal Covid-19.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1998-2005 Buya Ahmad Syafii Maarif menyampaikan, meningkatnya kasus Covid-19 saat ini menunjukkan bahwa virus ini dapat menyerang siapa pun dan tidak memandang derajat, suku, ras, ataupun agama.

"Kelompok yang menyangkal adanya Covid-19 hanya sedikit atau minoritas dari jumlah masyarakat umum lainnya. Kelompok kecil inilah yang harus terus disadarkan," ujarnya dalam acara Seri Webinar Cendekiawan Berdedikasi *Kompas* 2021 bertajuk "Kontribusi Kaum Agamawan dalam Penanganan Pandemi", Kamis (24/6/2021).

Buya memandang, adanya narasi penyangkalan Covid-19 tidak terlepas dari peran media sosial yang sulit dikendalikan. Jika tidak cermat mengolah informasi, masyarakat dapat terjebak dalam doktrin yang sesat dan radikal.

Seluruh tokoh agama harus terus mengatakan bahwa bahaya Covid-19 itu nyata dan bukan direayasa. Gunakanlah bahasa persuasif yang menyentuh hati. Mungkin cara ini akan lebih tersampaikan karena pada hakikatnya manusia itu baik.

Dia menambahkan, selain memberikan nasihat kepada masyarakat akan pentingnya disiplin dalam menjaga protokol kesehatan, tokoh agama haruslah menjadi yang terdepan dalam memberi teladan. Dalam syiarnya juga, para pemuka agama dapat menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat sehingga, apabila ini dilakukan oleh semua pemuka agama tentu akan sangat efektif dan bisa menyelamatkan banyak jiwa. **Aldi**



KOMUNITAS "CANGKIR OPINI" SUARAKAN ISLAM MODERAT

Moderasi beragama adalah cara beragama yang dilakukan dengan pandangan tengahan, atau menolak cara-cara ekstrimisme yang nir ilmu dalam menyebarkan agama. Dalam berbagai macam kajian, moderasi dianggap sebagai cara beragama yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak berlebihan serta mencintai kedamaian.

Berangkat dari perspektif ini, IMM sebagai organisasi islam yang bergerak di ranah kemahasiswaan mencoba untuk menyuarakan islam moderat di tengah masyarakat melalui berbagai macam kegiatan.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Ngopi

Bareng: Apa itu Islam Moderat? yang diinisiasi oleh Cangkir Opini, sebuah komunitas digital yang dibentuk oleh IMM Jawa Timur dalam kegiatan bertajuk Islam Moderat untuk Mencegah Ekstrimisme Berbasis Agama, di Surakarta, Solo-Jawa Tengah, Jum'at (18/06).

IMM melalui Cangkir Opini mengundang Hammam Sanadi, tokoh intelektual yang juga aktif sebagai dosen IAIN Salatiga. Majelis Pendidikan Kader PWM Jateng dan Mahmud Hariono, mantan narapidana terorisme asal Jombang yang pernah dikirim ke Filipina untuk berlatih militer serta akademisi dan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Nafik Muthohirin yang juga aktif meneliti persoalan

radikalisme agama di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Hammad Sanadi memberikan pandangan bahwa moderasi beragama adalah upaya memberikan ruang yang selebar-lebarnya kepada anak muda dalam mengekspresikan agama tapi dengan satu tujuan, yaitu menjaga harmonisasi beragama dan bermasyarakat.

“Aktualisasinya Islam moderasi harus menjadi narasi alternatif agar gerakan-gerakan ekstrimisme beragama tidak menyebarluas di kalangan masyarakat. Ruang-ruang publik harus diberikan kepada generasi muda yang memiliki wawasan moderat guna mencerahkan keberagamaan masyarakat yang saat ini sangat mudah dipengaruhi oleh paham-paham ekstimisme,” terang Dosen IAIN Salatiga itu.

Nafik Muthohirin yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa narasi-narasi moderasi beragama harus disebarluaskan di media sosial. Dia menyadari bahwa organisasi mainstream seperti Muhammadiyah dan NU adalah organisasi yang sangat representatif untuk berbicara moderasi beragama di Indonesia.

“Generasi muda memiliki peran yang signifikan dalam menyuarakan paham beragama yang moderat di media sosial,” terang Nafik.

Ia menambahkan, anak muda memiliki kreatifitas seperti kemampuan membuat konten-konten kreatif di media sosial, seperti desain poster/flyer, membuat meme, dan menuliskan narasi atau artikel Islam progresif bisa dijadikan alat untuk menyuarakan moderasi beragama yang sampai hari ini masih jarang mencuat di media sosial.

Di akhir, Mahmud Hariono memberikan pandangan bahwa sebagai mantan napi terorisme ia berpesan bahwa jangan sampai generasi muda mengikuti jejaknya. Hal ini akan memberatkan keluarganya, ia teringat ketika masih di penjara yang memberatkan keluarganya.

“Karena tindakan masa lalu saya, keluarga saya harus bolak balik menjenguk saya dari rumah ke

“Generasi muda memiliki peran yang signifikan dalam menyuarakan paham beragama yang moderat di media sosial.”

NafikMuthohirin,

Dosen UMM dan Penelitiisu-isuRadikalisme dan Multikulturalisme



Nusakambangan,” tuturnya.

Pasca lepas dari penjara, ia bertekad untuk menyebar luaskan ajaran Islam yang cinta damai, dan tidak lagi berurusan dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Ia berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang mencintai kedamaian, dan harusnya menjadi penyejuk bagi siapapun yang tahu dengan Islam, bukan sebaliknya, yang digunakan untuk berperang.

Kegiatan Ngopi Bareng ini juga sangat diapresiasi oleh ketiga pembicara. Karena sangat jarang dilakukan oleh generasi muda. Kegiatan diskusi yang mengkaji topic moderasi agama harus terus menerus digalakkan Islam kedepan tetap menjadi agama yang *rahmatan lil alamin*.

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh kalangan aktivis muda yang berasal dari berbagai macam latar belakang organisasi. **Nam**

DRAMA KEBAHAGIAAN BERGANTI KESEDIHAN

Pengadilan Agama Cibinong Jawa Barat mengabulkan gugatan Larissa Chou pada Rabu (16/6). Itu menandakan tali pernikahan Muhammad Alvin Faiz dengan Larissa resmi berakhir. Bagi Larissa, Alvin dianggap kurang dewasa, abai terhadap istri dan anak, serta lebih mementingkan hobi dan teman dibanding keluarga. Beberapa alasan tersebut mewakili faktor umum yang menjadi alasan perceraian.

Muhammad Alvin Yusuf adalah putra Ustadz Arifin Ilham, sementara Larissa Chou merupakan muallaf beretnis Tionghoa. Pasangan ini menikah di usia muda pada 2016. Saat itu, Alvin masih berusia 17 tahun dan Larissa berumur 20 tahun. Setelah 5 tahun mendayung bahtera keluarga, mereka dikarunia satu putra bernama Muhammad Yusuf Alvin Ramadan.

Awal menikah hingga akhir tahun lalu, pasangan ini selalu disorot media dengan ragam kebahagiaan. Namun, siapa yang bisa menduga, ternyata di balik senyum manis Larissa di depan media, justru tersimpan sakit hati. Pada Mei lalu, karena sudah tidak tahan dengan sikap Alvin, Larissa menggugat cerai putra mubaligh pesohor tersebut.

Melalui *story Instagram*-nya, Larissa menyebut 7 alasan harus bercerai dengan Alvin, di antaranya tak pernah membimbing agama, tak pernah ditemani saat sakit, selalu prioritaskan hobi dibanding anak, tak fokus mengurus keluarga dan pesantren, tidur dengan wanita lain dan selalu menjadikan Larissa untuk menutupi kesalahan.

“Untuk apa (hidup) dengan pria yang tidak pernah ada di saat aku butuh? Di

mana letak sosok suami?,” tulis Larissa, seperti dikutip dari Instastory-nya.

Problem Nikah Usia Muda

Perceraian Alvin dan Larissa merupakan contoh nyata problem pernikahan di usia muda. Menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia (KPAI) Rita Pranawati, faktor peningkatan tingginya perceraian disebabkan pada tingginya angka perkawinan anak usia muda.

Meski pemerintah sudah berupaya membatasi perkawinan anak dengan merevisi batas minimum perkawinan yang semula usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun. Namun, adanya celah dispensasi pernikahan di bawah umur, pada akhirnya cukup menyumbang tingginya perkawinan anak.

Tak pelak, Indonesia menempati urutan tertinggi kedua setelah Kamboja untuk wilayah ASEAN. Perkawinan anak juga dilandasi berbagai masalah sosial serius yang akhirnya berpengaruh pada ketahanan keluarga muda. Permasalahan perkawinan anak antara lain disebabkan hubungan seks pranikah dan kehamilan yang tidak direncanakan.

Selain itu, pengelolaan keluarga

dalam perkawinan anak juga turut menjadi faktor tingginya angka perceraian, seperti pengeluaran ekonomi yang lebih besar karena kurang mampu dalam tata kelola keuangan, konsumsi rokok, alkohol serta narkoba.

“Dampak teknologi informasi dalam keluarga bisa memberi dampak positif. Namun, pada keluarga tertentu, juga bisa menjadi penyebab utama permasalahan rumah tangga. Terlalu sibuk dengan gadget dan teknologi bisa mengurangi waktu bersama anggota keluarga,” terang Rita.

Sebab, terlalu hanyut dalam dunia maya mampu meningkatkan individualisme dan kurangnya aktivitas fisik sehingga muncul fenomena kecanduan gadget, terutama bermain *games*. Kasus inilah yang juga menjadi salah satu alasan serius bagi





M. Alvin Faiz dengan Larissa Chou saat masih menjadi pasangan suami-istri.

Larissa menggugat cerai Alvin.

Penggunaan gadget yang berlebihan tersebut berdampak pada pola komunikasi antar pasangan. “Komunikasi antar pasangan itu sangat penting dalam rangka mempertahankan rumah tangga,” kata Rita.

Setiap tahun, angka perceraian selalu naik, terlebih di masa Covid-19 seperti saat ini. Contoh kasus di Kendal, salah satu kabupaten di Bali, persentase perceraian naik cukup tinggi dari 4,6 persen menjadi 9,1 persen pada 2020.

Rita mengatakan, faktor lain yang turut menyumbang banyaknya perempuan mengajukan gugat cerai adalah terjadinya perubahan populasi

penduduk dan struktur keluarga, peran gender, serta peran dalam keluarga.

Adanya varian bentuk keluarga yang semula berbentuk keluarga besar (*extended family*) dalam satu payung rumah tangga, seperti ada kakek, nenek, paman, bibi dan sebagainya serta keluarga kecil (*nuclear family*), di mana hanya ada suami, isteri dan sedikit anak sangat berpengaruh pada pola asuh dan manajemen dalam pengurusan rumah tangga.

Selain itu, adanya pergeseran peran perempuan yang semula sangat terbatas pada peran-peran domestik, kini hampir tidak ada persoalan pada aspek ini. Sebab itu, pada situasi Covid-19 ini, sangat berat bagi perempuan pekerja. Kebijakan “Work From Home” dan “Sekolah Daring” menjadi beban berlipat perempuan pekerja.

Beban pekerjaan yang tidak dapat terdistribusikan dengan baik bersama pasangan akan menimbulkan perselisihan. Sebab, perempuan dituntut mengerjakan pekerjaan kantor dan rumah dalam waktu bersamaan.

Meningkatkan Ketahanan Keluarga

Dalam upaya mempertahankan dan memaksimalkan hubungan pasangan suami-isteri, maka perlu meningkatkan ketahanan keluarga dengan memaksimalkan kemampuan dasar dan kekuatan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan. Peran keluarga sangat penting karena peran keluarga menentukan generasi masa depan yang berkualitas.

Ketahanan keluarga juga akan menentukan kualitas bangsa dan ketahanan nasional. Juga, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan fungsi bermasyarakat.

Kunci peningkatan ketahanan pada keluarga bisa dilakukan dengan sejumlah cara, seperti meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan pendidikan pada perempuan, perubahan kesempatan kerja pada perempuan, revolusi kontrasepsi, menurunkan TFR (*total fertility rate*), dan memperbaiki pola komunikasi internal.

Salah satu cara pandang penting yang perlu dibangun untuk mencapai keluarga sakinah yang memiliki ketahanan terhadap berbagai tantangan kontemporer adalah perspektif kesetaraan dan keadilan dalam relasi marital, parental (orang tua-anak) dan sosial (keluarga inti dengan unit-unit sosial yang lebih luas), yang termanifestasikan dalam pikiran, tindakan dan kebiasaan yang setara dan adil. **Nafik/Ika**

PEMBELAJARAN TATAP MUKA, UPAYA MENGHINDARI *LEARNING LOSS*

Tahun ajaran 2021 akan berlangsung Juli ini. Pemerintah telah menyiapkan skema aturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka meski ancaman Covid-19 masih menghantui. Kebijakan ini dimaksudkan agar Indonesia tidak mengalami learning loss.

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Anwar Makarim mengumumkan pada awal tahun ajaran baru Juli 2021 sekolah diizinkan membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi.

Ada dua alasan kenapa pembelajaran tatap muka secara terbatas segera dilaksanakan. Nadiem menegaskan, para pendidik dan tenaga pendidik telah divaksinasi. Selanjutnya, apabila pembelajaran tatap muka tidak segera dilaksanakan, potensi terjadinya *learning loss* sangat tinggi mengingat kondisi pendidikan nasional telah tertinggal dari banyak negara lain selama masa pandemi ini.

Hingga saat ini, ancaman Covid-19 masih merebak ke berbagai penjuru dunia. Melansir Worldometers hingga Rabu (23/6), total kasus Covid-19 di seluruh dunia terkonfirmasi sebanyak 174 juta kasus. Sebanyak 158 juta pasien telah sembuh, dan sekitar 3.897.080 orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, penyebaran

Covid-19 meningkat signifikan. Kasus harian telah meledak hingga tembus belasan ribu.

Seiring dengan meningkatnya penyebaran Covid-19, tentu banyak

pihak yang cemas apabila pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan. Apalagi wali atau orang tua murid, tentu tidak tega apabila melihat buah hatinya tertular. Kekhawatiran banyak pihak inilah kemudian yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin sekolah tatap muka.

Membahas pendidikan tentu membahas masa depan bangsa. Apabila suatu bangsa mengalami



keterpurukan, jelas ada yang salah dalam sistem pendidikan yang dijalankan. Dalam konteks pandemi seperti ini, tentu semua kalangan benar-benar mempertimbangkan dengan matang demi keberlangsungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Dari itu, ke depan peserta didik dapat tumbuh berkembang menjadi insan yang berkarakter dan cerdas.

Hingga saat ini, para pendidik dan tenaga pendidik sudah mendapatkan vaksinasi. Bahkan, pemerintah menargetkan akhir Juni kemarin menjadi tahap terakhir proses vaksinasi untuk para tenaga pendidik. Meskipun demikian, jika pembelajaran tatap muka atau campuran (juga diadakan pembelajaran daring), maka protokol kesehatan juga harus menjadi

“Kita tidak bisa menciptakan generasi yang mengalami *leraning loss*, yang tidak bisa dibalikkan lagi. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk orang tua untuk bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan di sekolah,”



Nadiem Anwar Makarim,
Mendikbud-Ristek

perhatian demi menjaga keamanan dalam proses pembelajaran.

Learning loss

Salah satu pertimbangan Nadiem mengadakan pembelajaran tetap muka secara terbatas yaitu untuk menghindari adanya *Learning Loss*. Nadiem mengatakan, *Learning Loss* atau kehilangan satu generasi yang tidak belajar sama sekali rentan terjadi

selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Itu bisa terjadi mengingat infrastruktur dan fasilitas pendukung peserta didik yang berbeda-beda.

Tentu, saat pandemi seperti saat ini mengakibatkan keaktifan belajar siswa menurun. Terlebih lagi kendala dengan fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Akses pembelajaran jelas tidak dapat



dijangkau oleh peserta didik maupun guru.

Hal inilah yang selanjutnya akan berdampak terhadap psikologis peserta didik. Seperti kebosanan, jenuh, sumpek, bahkan depresi karena banyaknya tugas yang diberikan. Siswa juga akan merasa kesepian, tidak dinamis, dan ketidakefektifan belajar. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak berbagai macam laporan kekerasan yang terjadi di rumah tangga.

Selain itu, peningkatan level stres orang tua pasti akan tumbuh seiring dengan kesibukannya di dalam pekerjaan sehingga tidak sepenuh hati mendampingi buah hatinya. PJJ yang saat ini berlangsung belum dapat dikatakan berjalan secara optimal.

“Ada berbagai faktor yang membuat PJJ tidak optimal bagi sebagian masyarakat. Apalagi, di daerah terluar dan tertinggal, di mana infrastruktur dan teknologinya pun kurang memadai,” terang Nadiem.

Proses PJJ yang sudah berjalan lama dan berbagai kasus dan keluhan yang terjadi menjadi pertimbangan matang pemerintah untuk bisa mengadakan sekolah tatap muka. Sedikit orang yang mengetahui bahwa 25 persen sekolah di Indonesia sudah melakukan tatap muka. Pemerintah, tentu bersikukuh untuk menggeser angka tersebut menjadi lebih besar.

Potensi *learning loss* juga disorot oleh pakar epidemiologi dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman. Menurutnya, masalah buka dan tutup sekolah kompleks, karena pada dasarnya penutupan sekolah harusnya menjadi opsi terakhir dalam pengendalian pandemi.

Menurut Dicky, sekolah sangat penting, tak hanya karena terkait dengan pendidikan anak, tapi juga

kondisi mental anak-anak. Namun, ujarnya, yang terjadi adalah kini pelonggaran-pelonggaran sudah diterapkan, seperti dalam hal pembukaan *mall*, tapi sekolah belum dibuka.

“Itu pendekatan salah dan tak berbasis ilmiah. Seakan kita memproteksi anak, padahal tidak,” ujar Dicky.

Melalui pertimbangan ini, pemerintah menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka yang berjalan mendatang akan menegatkan protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka

muka pada tahun ajaran baru 2021 sangat terlalu dini dilaksanakan.

Melihat persoalan di atas, kondisi nyata penanganan Covid-19 yang belum maksimal dan masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, perlu dipertegas kembali. Perlu adanya kesiapan yang lebih matang apabila wacana sekolah tatap muka benar-benar akan diadakan pada tahun ajaran baru mendatang.

Dalam hal ini pemerintah bisa berkolaborasi memetakan kondisi di daerah-daerah mana yang memungkinkan untuk diadakan



juga berkapasitas maksimal 50 persen dan tidak ada aktivitas di luar sekolah.

“Kita tidak bisa menciptakan generasi yang mengalami *learning loss*, yang tidak bisa dibalikkan lagi. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk orang tua untuk bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan di sekolah,” tegas Nadiem.

Meski demikian, wacana pembelajaran tatap muka ini mendapat tanggapan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim menilai, rencana Mendikbud-Ristek membuka pembelajaran tatap

sekolah tatap muka dan yang belum siap. Pada dasarnya pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus didapatkan dan pemerintah sebagai pelaksana wajib untuk mewujudkan.

Maka dari itu, kondisi yang saat ini masih berlangsung, di mana pendidikan tengah mengalami masa krisis, upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu harus selalu menjadi fokus utama. Tentu, bangsa ini tidak ingin mengalami keterpurukan mendalam akibat terjadinya *lost generation* dengan terabaikannya dunia pendidikan di masa pandemi ini. **Aldi**

BERTATAP MUKA DI TAHUN AJARAN BARU

Bagi peserta didik, pengalaman pertama masuk sekolah biasanya dipenuhi perasaan senang. Senang karena akan mendapat teman baru, guru baru dan lingkungan baru. Dalam kondisi yang normal, semua itu bisa menjadi kenyataan. Tetapi, dalam kondisi sekarang ini, berbagai kesenangan itu bisa tetap dirasakan tapi masih ada yang kurang karena semuanya dilakukan melalui dalam jaringan.

Kondisi demikian sedikit terobati dan akan bisa dirasakan peserta didik karena tahun ajaran baru 2021 ini

akan dilakukan model pembelajaran campuran: berbasis dalam jaringan dan tatap muka secara terbatas.

Survei terbaru Kemendikbud-Ristek mengenai kesiapan sekolah melakukan proses pembelajaran tatap muka memperlihatkan sebanyak 50 persen dari sekitar 400 ribu sekolah di Indonesia siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Bahkan, 33,63 persen di antaranya telah mulai melaksanakan tatap muka ini.

Menurut Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud-Ristek Sri

Wahyuningsih, survei tersebut telah meliputi jenjang pendidikan PAUD, SMA dan SLB.

“Sebab itu, tahun ajaran baru 2021-2022 tetap akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Juli mendatang,” terang Sri.

Namun, tambah Sri, catatannya pemberlakuan ini hanya bisa dilakukan di daerah/kota yang termasuk zona hijau dan guru-gurunya sudah dilakukan vaksinasi. Hal ini mengingat penularan Covid-19 yang tak juga berhenti.

Justru, kecenderungannya lebih



meluas dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kasus per hari mencapai di atas 14 ribu infeksi di Indonesia. Korban yang meninggal juga mencapai lebih dari 250 orang setiap harinya.

Tentu, semua orang tak mau kejadian ini terus berlangsung. Selain karena didera takut, aspek pendidikan nasional mengalami kelesuhan. Tak hanya peserta didik yang mulai mengeluh pembelajaran berbasis *on line*, guru, tenaga pendidik, bahkan orang tua juga mengalami puncak kebosanan menerapkan pembelajaran *on line*.

Juli 2021 akan dimulai tahun ajaran baru. Kemendikbud-Ristek telah mengeluarkan kebijakan bersama 4 menteri mengenai diberlakukannya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dikatakan terbatas karena proses pembelajaran dalam satu kelas hanya bisa diikuti 50 persen peserta didik secara bergantian. Begitupun dengan pendidik dan tenaga pendidik akan datang di lingkungan sekolah dengan tidak penuh waktu.

Realisasi kebijakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru 2021

itupun diberlakukan di daerah-daerah yang angka penularan Covid-19 rendah. Jika pemerintah daerah tidak menghendaki pembelajaran tatap muka, maka tidak ada paksaan bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk tidak melaksanakannya.

Pada dasarnya, kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini diambil mengingat kegelisahan sejumlah pakar pendidikan yang mengkhawatirkan terjadinya *learning loss* pada kemampuan peserta didik hari ini. Sebab, tidak semua materi pelajaran bisa diajarkan melalui *zoom*, *google meet*, atau aplikasi belajar *on line* lainnya.

Matematika, misalnya, banyak peserta didik yang tidak mudah menangkap materi pelajaran ini. Apalagi, jika sudah menyangkut rumus-rumus sulit yang membutuhkan pengembangan pemikiran dan banyak latihan soal. Jika mereka tidak menguasai satu materi atau sub materi pelajaran saja, maka mereka bisa kehilangan pemahaman tentang materi-materi tersebut.

Sekretaris Majelis Pendidikan

Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Alpha Amirrachman mengatakan, *learning loss* merupakan satu keprihatinan yang patut diwaspadai di masa krisis pendidikan akibat pandemi ini.

Alpha menambahkan, akan ada peserta didik yang kehilangan kemampuan memahami materi dan menyelesaikan soal-soal yang hanya bisa diberikan di dalam kelas. Sebab itu, perlu ada strategi khusus supaya pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak dilakukan hanya dengan aplikasi belajar *on line*.





“PJJ juga bisa dilakukan dengan guru mendatangi peserta didik, jadi seperti belajar berkelompok di rumah,” kata Alpha kepada *Majalah CaraPandang*, belum lama ini.

Merujuk informasi dari akun resmi *Instagram* Direktorat SD Kemendikbud-Ristek pada Rabu (23/6) menyebutkan beberapa prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas, yaitu: *Pertama*, kondisi kelas meliputi jaga jarak minimal 1,5 meter, dan jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 18 siswa.

Kedua, untuk jadwal pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Ketiga, perilaku wajib di antaranya menggunakan masker, menerapkan etika batuk/bersin, rajin mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir atau *hand sanitizer*, serta menjajaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.

Keempat, warga satuan pendidikan (sekolah) harus sehat dan jika mengidap komorbid (kondisi ketika dua penyakit atau lebih hadir secara bersama-sama) harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk orang yang serumah dengan warga sekolah.

Kelima, untuk kegiatan olahraga dan ekstra kurikuler pada masa transisi ini tidak diperbolehkan dilakukan di sekolah. Keenam, di masa transisi ini kegiatan di luar sekolah tidak diperbolehkan, di masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, untuk kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat. **Nafik**



SEPAK BOLA MENYATUKAN EROPA

Kompetisi sepak bola terbesar di Eropa, UEFA Euro, kembali digelar mulai Juni lalu. Helatan di Benua Biru ini disambut antusias para pecinta olahraga. Ia menjadi semangat masyarakat dunia untuk kembali bersatu dan menatap optimisme kehidupan yang baru di tengah ancaman pandemi Covid-19.

Kejuaran Eropa UEFA 2020 kali ini merupakan edisi ke-16 yang diselenggarakan Uni Sepak Bola Eropa (UEFA). Turnamen ini diadakan di 11 kota yang terletak di 11 negara anggota UEFA. Semula dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni hingga 12 Juli 2020, namun tertunda karena ancaman Covid-19. Turnamen ini dijadwal ulang menjadi 11 Juni hingga 11 Juli 2021. Walaupun diselenggarakan pada tahun 2021, turnamen ini tetap menggunakan nama "UEFA Euro 2020".

Ketika WHO menyebut wabah Covid-19 sebagai pandemi, seketika menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi dampaknya kepada pemain, staf, dan pengunjung di 12 kota tuan rumah turnamen.

Presiden UEFA Aleksander Ceferin dalam Kongres UEFA Ke-45 di Montreux mengatakan, Sepak bola baru saja mengalami fase sulit, dimana belum pernah ada satu pun manusia yang menghadapi fase ini. Namun, berkat usaha bersama dalam menghadapi krisis, sepak bola dapat kembali seperti sedia kala.

Perhelatan EURO 2020 memunculkan banyak hal baru. Perhelatan ini menjadi salah satu kisah terhebat dalam kurun waktu satu abad terakhir. Kompetisi ini bisa diadakan di tengah wabah Covid-19 yang belum selesai, namun dengan standar protokol kesehatan yang ketat.

Penanganan Covid-19 yang baik dan terkendali telah memberikan kabar baik dengan dibolehkannya supporter untuk hadir ke stadion. Namun, dengan



begitu ada sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh para supporter untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menyaksikan pertandingan sepak bola.

Kebijakan detail mengenai persyaratan tersebut tentu telah diatur oleh masing-masing tuan rumah yang menyelenggarakan pertandingan. Protokol Kesehatan juga menjadi fokus utama dan tes cepat (*rapid test*) pasti tersedia di sekitar stadion yang menyelenggarakan pertandingan.

"Ini (Euro 2020) akan menjadi kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Eropa sedang beradaptasi. Eropa hidup dan merayakan kehidupan. Eropa telah kembali," kata Ceferin.

Terdapat enam grup yang bertanding di 11 negara berbeda. Tuan rumah edisi kali ini adalah Italia (Roma), Azerbaijan (Baku), Denmark (Kopenhagen), Rusia (St. Petersburg), Belanda (Amsterdam), Rumania (Bukares), Inggris (London), Skotlandia (Glasgow), Spanyol (Seville), Jerman (Muenchen), dan



Hungaria (Budapest).

Perhelatan kali ini juga menyajikan hal yang menarik. Euro 2020 akan menyajikan grup yang disebut sebagai grup neraka. Grup F, dihuni Portugal, Jerman, Prancis, dan Hungaria. Timnas Portugal datang berstatus sebagai sang juara bertahan di Euro 2020. Sementara timnas Prancis datang dengan status sebagai juara Piala Dunia 2018. Grup Neraka Euro 2020 ini juga akan menyajikan partai ulangan final Euro 2016.

Daratan Eropa dalam beberapa bulan terakhir telah banyak dilanda konflik. Seperti Armenia dengan Azerbaijan dan Rusia dengan Nato. Konstelasi politik antar negara tentu menimbulkan perpecahan antar bangsa. Namun, dengan perhelatan sepak bola empat tahunan ini terbukti

bisa menyatukan mereka.

Ibarat berjalan di gelap malam, digelar Euro 2020 adalah cahaya yang menyinari daratan Eropa. Banyak masyarakat yang menunggu perhelatan akbar ini sebagai momen untuk bersatu, bergembira, dan menikmati laga dalam setiap babak pertandingan.

Euro 2020 disebut-sebut akan menjadi turnamen yang cukup spesial sepanjang sejarah gelaran Piala Eropa. Tak hanya dirasakan di Eropa, perhelatan akbar ini juga telah dinanti-nanti oleh berbagai warga dunia.

Di Indonesia, khususnya, kompetisi ini sangat di nanti-nanti. Kehadirannya membuat para pecinta sepakbola tanah air menyambut dengan antusias. Meskipun berbeda-beda dalam mendukung tim kesebelasan, namun

dengan gembira ikut serta merayakan.

Selain menyatukan berbagai perbedaan, Euro kali ini juga memiliki spirit untuk ramah terhadap lingkungan dan mencegah timbulnya limbah berlebih. Negara yang penggemarnya dikenal gemar melakukan perjalanan dalam puluhan ribu kilometer untuk turnamen besar seperti Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol secara signifikan akan mengurangi jejak karbon.

UEFA juga telah memberikan pernyataan bahwa tidak diubahnya nama turnamen menjadi Euro 2021 karena banyak material bermerek yang sudah diproduksi sebelum turnamen ditunda. Perubahan nama turnamen tentunya akan mengubah barang-barang yang sudah diproduksi menjadi limbah. **Aldi**

MENYOAL DEMOKRASI SETENGAH HATI

Demokrasi sebagai salah satu sistem pemerintahan memiliki wajah yang tidak tunggal. Pasalnya, praktik berdemokrasi di sejumlah negara masih menyisahkan pesakitan. Selalu saja ada pihak yang mengabaikan nalar etik dan membangun kekuasaan dengan cara-cara yang tidak bermoral.

Satu kasus yang belakangan menjadi tren, yaitu masifnya pencitraan elit politik di media sosial. Berbagai iklan politiknya yang mulanya disebar di banyak media *mainstream* dan konvensional, kini secara luas didesiminasikan melalui jejaring sosial. Tak pelak, konsultan media yang bertugas membranding profil elite politik tertentu, tumbuh bak jamur di musim hujan.

BuzzerRp dibentuk untuk kepentingan membangun pencitraan melalui berbagai narasi bodong yang diviralkan. BuzzerRp juga bertugas memproduksi artikel-artikel bernada menjatuhkan kepada lawan politik dari klien tertentu.

Imbasnya, masyarakat atau netizen terpaksa mengkonsumsi setiap informasi politik yang bersumber di media. Informasi yang dikonsumsi menciptakan keyakinan terhadap sosok politikus tertentu. Citra inilah yang diyakini sebagai acuan untuk memilih seorang pemimpin, mengenyampingkan kapasitas pribadi dan sejauh mana wawasan yang dimiliki oleh calon pemimpin.

Inilah yang menjadi cikal bakal kemunculan patologi dalam demokrasi kita, di mana citra lebih diutamakan daripada kualitas, dan politik dijadikan sebagai ajang umbar janji manis, menebar kebohongan, bukan menguji kualitas visi dan misi yang dibawa. Mahfud MD

menyebutnya sebagai demagog politik.

Klien politisi maupun partai tertentu berani mengeluarkan kocek besar hanya untuk membangun citra humanis di dunia maya. Padahal, sesungguhnya, janji manis seorang politisi tak pernah sesuai dengan kenyataannya.

Salah satu faktor kenapa fenomena ini menggejala dalam alam demokrasi di negeri ini, tidak lain karena ketidakberdayaan parpol dalam mendidik, mentransformasikan dan menuntun politikus dalam merancang visi politiknya.

Belajar dari Jepang, kemajuan negeri ini di bidang teknologi bukan karena kecerdasan dan kerja keras masyarakatnya, melainkan mereka tidak pernah meninggalkan etika publik yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsanya.

Bagaimana Mengobatinya?

Meski di tengah kondisi yang tidak menentu, secercah harapan agar bangsa ini terus maju dan menjadi bangsa yang ideal tetap ada. Demokrasi yang membawa misi kesejahteraan, kedaulatan, kebebasan, keterbukaan dan keadilan hanya perlu disuarakan sesering mungkin, agar tidak terbuai dengan citra politikus yang hanya menginginkan kekuasaan semata.

Partai politik yang selam ini memiliki tugas untuk mengusung calon yang akan dijadikan pemimpin memiliki tanggung jawab atas kaderisasi.

Proses kaderisasi harus memiliki muatan etika yang mengarahkan calon pemimpin agar lebih berempati pada persoalan kemanusiaan. Berani mengenyampingkan



Nur Alim Mubin AM

Sekretaris Umum DPD IMM Jawa Timur;
Pegiat Komunitas “Cangkir Opini” Malang

kepentingan elit yang hanya memikirkan diri sendiri dan loyal terhadap kepentingan bangsa sendiri.

Sebab itu, dibutuhkan kerja-kerja edukatif untuk menciptakan proses kaderisasi politik yang berkualitas, teruji dan bermoral. Selain itu, dibutuhkan tradisi politik yang literatif untuk membangun panggung politik yang lebih maju dan konstruktif.

Hidup dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, sangat tidak mungkin politik mengesampingkan peran media. Akan tetapi, aneka narasi yang diproduksi media tidak boleh dikonsumsi secara mentah. Publik diharuskan mengimbangnya dengan sikap kritis agar tidak terjebak pada berbagai wacana bohong yang dimainkan sejumlah pihak tak bertanggungjawab.

Di era teknologi informasi yang maju ini, nalar kritis harus benar-benar dikedepankan. Ragam isu yang sengaja dimainkan untuk tujuan mengangkat citra politikus, meski sesungguhnya itu tak lebih dari sekadar janji manis, itu semuanya perlu dibuang dalam “keranjang sampah”.

Realitas politik harus didasari pada pikiran yang kritis demi menjaga kebenaran tetap berada pada posisinya. Caranya, bisa dengan menguatkan literasi dan tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar. Hal ini bisa dicapai dengan membuka cakrawala berpikir, mau berkata apa adanya (asertif), dan mengenyampingkan ego pribadi dan kelompok tertentu.

Mulai sekarang, publik harus membiasakan diri untuk melihat semua peristiwa secara holistik, menimbang-nimbang setiap keputusan, dan mengedepankan kebenaran yang sesuai dengan fakta.

Publik harus menyadari bahwa fenomena politik yang menitikberatkan pada citra bukan hanya karena kemajuan teknologi, namun karena ketidakmampuan masyarakat dalam membangun suasana politik yang beretika. Karena itulah, politik dikendalikan oleh kepentingan pribadi yang kerap mengenyampingkan kepentingan bersama.

Fenomena politik yang terjadi hari ini sudah jauh dari nilai politik yang menjunjung tinggi kemaslahatan semua orang. Hal ini karena politik diwarnai dengan pikiran oportunistik dan pragmatis. Maka sangat wajar bila hal yang disampaikan ke publik berbeda dengan apa yang terjadi.

Jika politik semacam ini dibiarkan tumbuh, maka akan sangat membahayakan demokrasi ke depan. Masyarakat hanya akan menyaksikan pemimpin yang terus menerus membicarakan kelebihannya, dan tidak pernah mau terlihat kekurangan. Pada akhirnya, pemimpin yang seperti ini akan sangat anti dengan kritik.

Politik harus kembali pada tujuan mulianya, yaitu membangun kemaslahatan bersama melalui kekuasaan atau lembaga bernama negara. Sebab itu, etika politik yang berorientasi pada kemanusiaan dan kebangsaan perlu diperkuat sebagai *detoks* demokrasi nasional yang sedang sakit.

Akhirnya, publik membutuhkan pemimpin yang mengayomi rakyatnya, mencintai dengan ketulusan hati dan bekerja hanya untuk melayani rakyatnya semata. Pemimpin ibarat ibu yang membesarkan anaknya, mengasahi sepenuh hati hingga ia tumbuh dewasa dan mandiri. Politik yang semacam ini perlu ditumbuhkan kembali agar demokrasi di Indonesia mencapai titik yang dicita-citakan.

MERAWAT MASA DEPAN KPK

Suatu saat penulis dan sejumlah teman kelas mahasiswa saya mengikuti seminar yang dihelat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika itu, saya dan sejumlah teman mengidolakan para pimpinan KPK karena berhasil melakukan penangkapan terhadap koruptor yang *notabene* para elite politik. Maka, sejak itu, kami bercita-cita ingin menjadi bagian dari lembaga anti rasuah tersebut.

Hampir setiap hari, penulis terpesona dengan berita operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Bagi penulis, KPK tak ubahnya seperti “pahlwan” yang menangkap para koruptor ganas dan menyelamatkan banyak aset negara. Betapa bangganya jika bisa bergabung menjadi pegawai KPK. Lembaga yang jujur dan berintegritas.

Harapan itu mengemuka kurang lebih 11 tahun yang lalu. Namun, kenyataannya sekarang jauh berbeda. Belakangan, berbagai berita yang meliput KPK penuh dengan narasi yang negatif seperti “KPK mati”, “KPK dilumpuhkan”, “revisi KPK”, atau KPK macan ompong”. Itulah kiranya *headline* pemberitaan media akhir-akhir ini.

Yang terbaru, pegawai yang getol memberantas KPK pun seolah sengaja disingkirkan, lagi-lagi untuk memukul mundur peran lembaga tersebut. Penulis menduga, serangkaian peristiwa yang dialami KPK tak lain karena keserakahan pihak tertentu, yang ingin melanggengkan keberadaan koruptor di negeri ini.

Pada kasus alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN, misalnya, ketidaklolosan sejumlah pegawai KPK menjadi ASN karena hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tidak lain karena rekayasa politis yang sengaja dilakukan untuk melemahkan KPK.

Stigmatisasi sebagai “Taliban”, “Anti-Pancasila”, dan “radikal” yang dilekatkan kepada pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan cara Orde Baru yang dipakai pimpinan KPK sekarang untuk membungkam para pegawai KPK yang kritis.

Cara-cara seperti ini sangat berbahaya untuk keselamatan demokrasi. Bagaimana mungkin orang-orang yang bekerja karena perintah Undang-Undang dihempaskan pula oleh tafsiran atas undang-undang?

Adanya TWK untuk pegawai KPK alih status menjadi ASN terasa janggal. Pegawai KPK harusnya tak perlu TWK, karena dengan melihat peran mereka selama ini sudah menunjukkan nasionalisme mereka.

Sebagai lembaga yang lahir dari amanat Undang-Undang, penulis mengerti posisi KPK berada dalam genggaman para politisi. Sejak DPR mengetok palu sidang paripurna yang mengesahkan Revisi UU KPK, pelemahan terhadap institusi ini tampak jelas.

Waktu itu, pengesahan tersebut disambut demonstrasi dari gabungan mahasiswa, elemen sosia dan akademisi. Namun, protes atas revisi UU KPK tersebut tak mendapat sambutan baik dari anggota DPR.

Upaya *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi (MK) pun telah dilakukan sejumlah pegiat anti korupsi. Namun, MK memutus berdasarkan uji materiil saja, padahal secara prinsip MK dapat membatalkan UU yang tidak sesuai dengan prosedur formil. Artinya, MK sebetulnya berwenang melakukan uji Formil. Hal ini sesuai pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan proses pembentukan UU dianggap melanggar UUD jika melanggar prinsip konstitusi, sehingga MK berwenang menyatakan proses pembentukan bertentangan dengan konstitusi yang berarti UU tidak berlaku untuk seluruhnya.

**

Masalah Pemberantasan Korupsi di Indonesia masih menjadi pekerjaan berat dan penuh tantangan. Korupsi beserta turunannya telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Peyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi kalangan birokrat menyisakan ragam penderitaan.

Tak terkecuali dan kondisi pandemic Covid-19 dimana



M. Ikhwan

Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

ekonomi terjun bebas, justru dana Bansos dikorupsi sebesar 17 Miliar rupiah saat dipimpin Juliari Batubara. Sebenarnya, korupsi di lingkaran Kemensos telah terjadi sejak bertahun silam. Hal tersebut tampak dari seringnya terjadi OTT pada pejabat di sekitar kementerian tersebut.

Dosen di Stanford Law School Lawrence M Friedman menyatakan, untuk mengukur efektivitas dari implementasi hukum di sebuah negara merujuk pada tiga indikator, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sayangnya, ketiga indikator tersebut masih menjadi persoalan di Indonesia, terutama terkait komitmen negara terhadap kejahatan korupsi.

Untuk struktur hukum misalnya, Kejaksaan dan Kepolisian masih belum menunjukkan performa terbaik dalam mengusut kejahatan korupsi. Penilaian ini setidaknya dapat dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap dua lembaga penegak hukum tersebut. Data Lembaga Survei Indonesia pada akhir 2018 menyebutkan bahwa untuk Kepolisian masih berada di bawah KPK, sedangkan presentase Kejaksaan Agung masih di bawah 70 persen.

Lalu pada substansi hukum pun tak jauh berbeda. Regulasi yang dihasilkan Presiden dan DPR belum sepenuhnya menunjang kinerja pemberantasan korupsi. Contoh, rekomendasi dari kesepakatan PBB melawan korupsi tak kunjung rampung diimplementasikan dalam hukum positif.

Terakhir pada bagian budaya hukum juga masih sama seperti dua poin lainnya. Pelaku korupsi yang ditangani KPK terhitung masih dalam skala besar. Merujuk pada data KPK menyebutkan, sejak 2016 sampai 2019 lembaga anti rasuah itu telah menetapkan 608 orang sebagai tersangka kasus korupsi. Data ini menandakan bahwa negara gagal dalam memberikan efek jera maksimal pada pelaku korupsi.

KPK lahir dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini dianggap banyak pihak mumpuni untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi. Bahkan, tak salah rasanya jika disebutkan bahwa kehadiran KPK dalam sistem penegakan hukum di Indonesia membawa iklim positif bagi pemberantasan korupsi.

Faktanya, banyak aktor yang selama ini dikenal “kebal hukum” dapat ditangani dengan baik oleh KPK. Mulai dari kepala daerah, menteri, ketua DPR, ketua DPD, ketua umum partai politik, hingga ketua MK sekalipun.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hambatan terhadap pemberantasan korupsi pun terlihat jelas. Institusi pemberantasan korupsi kerap mendapat serangan dari berbagai pihak, mulai dari pengajuan hak angket DPR, serangan terhadap pegawai ataupun Pimpinan KPK, revisi UU KPK hingga menjegal pegawai melalui TWK.

Abdurrahman Assegaf menyatakan, manusia sejatinya memiliki sifat dasar dan aksinya *neutral-passive*, berarti pada dasarnya manusia itu bersifat netral yang berpotensi untuk tidak baik dan tidak pula buruk. Manusia dibekali akal pikiran dan keimanan kepada Tuhan-Nya. Akal pikiran dan keimanan hendaknya sejalan selaras. Keselarasan tersebut melahirkan *transfer of knowledge yang kemudian menjadi transfer of values*.

Ini selaras dengan sembilan nilai antikorupsi yang digaungkan KPK supaya melahirkan sikap adil, berani dan peduli. Aksi dan reaksi manusia terhadap dunia luar adalah pasif yang hendak membentuk kepribadiannya. *Transfer of values* yang tidak tepat melahirkan kesenjangan antara akal dan keimanan.

Hal tersebut yang melahirkan sifat-sifat serakah, tidak peduli dan tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain. Korupsi terbukti telah menjadikan manusia serakah yang tak peduli keadaan sekitarnya. Masa depan KPK sangat tergantung pada hati nurani pemangku kebijakan. Hati nurani tak boleh mati. Semoga KPK hanya mati suri.

PETUALANGAN SERU TIGA SAHABAT

Judul Buku : Lumpu
Penulis : Tere Liye
Tahun Terbit : 2021
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Peresensi : Amir Rifa'I, Pecinta Novel dan Staff Pengajar AIK UMM

Seperti judulnya “Lumpu” seri ini menceritakan perjalanan tiga sahabat yaitu Raib, Seli dan Ali dalam menghadapi Lumpu, yaitu dengan misi untuk menyelamatkan Miss Selenia. Di novel ini, *Lumpu* diceritakan sebagai sosok yang kuat yang memiliki kemampuan untuk menghapus kekuatan milik lawannya.

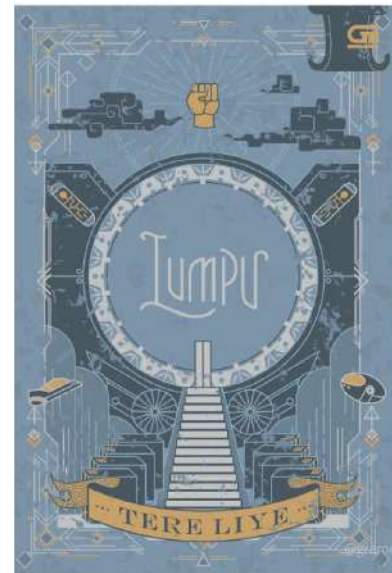
Pada seri ini, Raib, Ali dan Seli kembali menjalani petualangan yang seru di dunia paralel. Pada awal kisah diceritakan bagaimana mereka memperoleh izin dari sekolah di kehidupan mereka di bumi dengan mudah karena kecerdasan Ali.

Musuh yang akan mereka hadapi yaitu Lumpu. Langkah pertama yang dilakukan ketiga sahabat ini yaitu mencari Tamus, karena Tamus merupakan salah satu orang yang dicari oleh Lumpu.

Dengan mengikuti Tamus mereka berharap dapat menemukan cara untuk melawan Lumpu. Namun, sayangnya Tamus tetaplah orang yang licik. Ia mencuri sesuatu yang berharga milik mereka, namun ternyata dengan adanya peristiwa tersebut malah mempermudah rencana mereka untuk membuntuti Tamus.

Kita kembali ke petualang, kita tentu sudah kangen dengan trio ini? Misi mereka adalah menyelamatkan Miss Selenia, guru Matematika mereka. Tapi, apakah semua akan mudah? Siapa yang bersedia membantu mereka? Kali ini, si genius Ali memutuskan meminta bantuan dari sosok yang tidak terduga, karena musuh dari musuh adalah teman.

Pertarungan panjang telah menunggu mereka.



Lawan mereka adalah Lumpu, petarung yang memiliki teknik unik, yaitu melumpuhkan kekuatan lawan. Itu teknik yang amat menakutkan, karena Lumpu bisa menghabisi teknik bertarung.

Petualangan

Baseman luas rumah Ali kembali lengang usai sambungan dengan Miss Selenia terputus. Kisah panjang tentang Mata, Selenia dan Tazk akhirnya menjadi jawaban tentang siapa orang tua kandung dari Raib sebenarnya.

Di sisi lain, ada rasa sakit hati, marah dan kecewa dari Raib saat mengetahui orang tuanya bernasib tragis akibat pengkhianatan dari Miss Selenia, guru Matematika yang selama ini ia banggakan. Bagaimana tidak, Ibunya meninggal dengan keadaan yang menyedihkan. Ayahnya, yaitu Tazk yang merupakan ayah kandungnya juga tak kalah menyedihkan. Tazk menghilang tak ada kabar bagai ditelan bumi hingga hari ini.

Meskipun begitu, Raib tetap sadar jika waktu tak akan bisa diulang kembali. Bagaimanapun juga Miss

Selena adalah sahabat ibunya sendiri serta guru yang telah membimbingnya selama ini.

Miss Selena pula yang membuat Raib bisa bertemu dengan sahabat-sahabat terbaik yang belum pernah ia temui selama ini. Apapun yang terjadi di masa lalu, Raib tetap ingin menemukan Miss Selena secepatnya.

Saat itu juga Raib, Seli dan Ali segera bergegas untuk menemukan tempat Miss Selena terkurung oleh Lumpu selama ini.

Akademi Bayangan Tingkat Tinggi (ABTT) adalah tujuan pertama yang mereka kunjungi. Sayangnya, kedatangan mereka tidak semulus yang mereka harapkan. ILY tiba-tiba mendaratkan mereka di tengah aula tempat inagurasi angkatan baru di ABTT.

Sontak, kejadian ini membuat Master Ox de javu dengan peristiwa yang pernah ia alami beberapa tahun silam saat Selena, Mata, dan juga Tazk membuat kekacauan di tengah aula inagurasi angkatan baru ABTT.

Meskipun telah berbuat ulah di ABTT, akan tetapi mereka bertiga berhasil mendapatkan informasi dari Master Ox tentang keberadaan Tamus. Ali percaya jika Tamus bisa menjadi sumber informasi yang akurat tentang keberadaan Miss Selena saat itu.

Usai mendapatkan lokasi keberadaan Tamus, Raib, Seli, dan Ali pun segera meluncur bersama ILY ke titik tersebut. Mereka menemukan lokasi Tamus yang berada di perut salah satu gunung di Distrik Gunung-Gunung Terlarang.

Seperti yang telah mereka perkirakan, kedatangan mereka memang disambut oleh serangan dari Fala Tara Tana IV dan Tamus. Tak peduli seberapa ramah penjelasan Ali untuk menemui Tamus, Tamus tetaplah menganggap mereka sebagai musuh sekaligus biang kerok dari semua rencananya selama ini.

Di tengah pertarungan yang sengit itu, tak disangka sosok yang tak terduga lainnya tiba-tiba muncul. Lumpu datang penuh amarah untuk mengalahkan Tamus yang telah menjadi incarannya sejak peristiwa Cawang Keabadian itu terjadi.

Pada akhirnya, pertarungan menjadi milik Lumpu vs Tamus. Raib, Seli dan Ali tahu benar jika Tamus adalah musuh bebuyutan dari Lumpu. Namun, siapa yang menduga jika pada akhirnya Raib, Seli dan juga Ali malah membantu Tamus yang sudah terpojok dari Lumpu.

Pada akhirnya, musuh dari musuh adalah teman.

Mereka berempat bekerja sama menemukan cara untuk mengalahkan teknik melumpuhkan dari Lumpu.

Petualangan di dunia paralel terus berlanjut dan berkat informasi dari Tamus, Raib, Seli dan Ali pun menemukan kapal peninggalan dari Klan Aldebaran 40.000 tahun yang lalu. Tempat tersebut masih menyimpan banyak rahasia ilmu pengetahuan yang belum terpecahkan sebelumnya, termasuk salah satunya ialah cara mengalahkan teknik melumpuhkan dari Lumpu.

Uforia yang dirasakan Raib, Seli dan Ali saat menemukan jejak peninggalan Klan Aldebaran tersebut membuat mereka lupa jika Tamus telah menculik ILY dari mereka. Namun, bukan Ali namanya jika tak genius. Ali berhasil menemukan lokasi ILY pada sebuah apartemen milik Eins, seorang genius yang diandalkan Tamus untuk memecahkan berbagai jenis bahasa dan data dari benda-benda yang terdapat di kapal peninggalan Klan Aldebaran. Salah satu isi tabung tersebut juga memiliki data tentang cara mengalahkan Lumpu.

Meskipun kembali gagal menemukan Tamus dan ILY gara-gara ulah Lumpu lagi, mereka akhirnya berhasil bertemu dengan sosok genius seperti Eins. Eins merupakan penyandang disabilitas, tapi kemampuan otaknya dalam mengutak-atik beragam jenis teknologi tak usah diragukan lagi. Eins jugalah yang berhasil menerjemahkan kode dari tabung peninggalan Klan Aldebaran tentang cara menaklukkan teknik melumpuhkan tersebut.

Akhirnya, ketiga sahabat tersebut kembali bertualang. Siapa di antara Raib, Seli, dan Ali yang akan kehilangan kekuatan di dunia paralel? Untuk memahami buku ini ada baiknya kita telah membaca buku seri sebelumnya mulai dari buku *Bumi*. Adapun buku dengan judul *Lumpu* ini merupakan serial ke 11.

Buku setebal 368 halaman ini masih menyisahkan banyak pertanyaan, di antaranya keberadaan sosok dan keadaan Tazk saat ini seperti apa, Apakah Raib bisa melupakan masa lalu itu dengan memaafkan Miss Selena? Bagaimana dengan Tazk? Apakah Raib bisa bertemu lagi dengan ayahnya atau itu menjadi misteri? Bagaimana dengan jejak ekspedisi Klan Aldebaran 40.000 tahun yang lalu? Benda apa saja yang ditinggalkan oleh perjalanan besar tersebut? simak terus perjalanannya dalam buku dengan judul *Lumpu* ini. Selamat membaca.

Menguasai Kata-Kata

Noam Chomsky pada April 2010 pernah memberi kuliah umum di Brown University terkait kejahatan Israel dan Amerika atas Palestina. Di sebuah sesi diskusi, seorang peserta keberatan pada materi kuliah Chomsky yang pro Palestina. Ia menyitir nama Iran dan Khomeini yang, baginya, jauh lebih berbahaya karena Khomeini secara terang-terangan menyeru untuk membumihanguskan Israel.

Dengan tenang, Chomsky menyanggah pendapatnya dan berkata bahwa pernyataan Khomeini telah lama disalahpahami publik Barat. Chomsky mendikte pernyataan Khomeini: *“Israel should no longer exist.”* Itu bukanlah seruan genosida dan menuntut Israel bubar bisa dilakukan secara diplomatik. Justru, menurut Chomsky, Amerika dan Israel-lah yang terang-terangan menyeru bahkan melakukan pembumihangusan Palestina.

Kisah di atas hanyalah satu contoh kecil bagaimana sebuah bahasa (pernyataan, pertanyaan, ungkapan, istilah, atau kata) bisa menyeleweng dan diselewengkan maknanya. Di balik bahasa ada motif; motif itu bisa diselidiki dengan melacak situasi penutur. Nah, wawasan untuk menyelidiki motif di balik bahasa itulah yang dicoba urai dalam buku *“Dikuasai Kata-kata: Kumpulan Esai Bahasa”* ini.

Penulisnya Achmad San, seorang penyunting di sebuah surat kabar nasional terkemuka. Kendati pekerjaannya sebadan dengan tradisi menulis, Achmad San menolak berleha-leha dan telah menjajal dirinya dengan mempelajari berbagai perspektif dan teori linguistik. Itu terbukti dari daya jamah tema dalam buku ini yang sangat beragam dan kreatif. Salah satu esainya bahkan mengulas aspek kebahasaan

Resensi Buku :

“Dikuasai Kata-kata:
Kumpulan Esai Bahasa”

Penulis : Achmad San

Penerbit : Diva Press, Jogjakarta

Tahun : 2021, cet. 1.

Peresensi: A.S. Rosyid, Guru di MTs Alam
Sayang Ibu Lombok Barat

dalam al-Qur'an meski ia bukan sarjana studi Islam.

Mari menjelajahi daya jamah yang kaya itu. Dalam tulisan berjudul “Eufemisme Penguasa di Seputar Corona”, Achmad San mengupas tentang mengapa gaya bahasa politisi cenderung tidak lugas dan samar-samar. Achmad San, kemudian, memperkenalkan istilah eufemisme menyoroti pernyataan *double speak* Presiden Jokowi yang membedakan mudik dan pulang kampung.

Eufemisme presiden sukses mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah sesungguhnya, yaitu regulasi permudikan di era pandemi yang orat-marit. Eufemisme ditemukan juga dalam pernyataan pejabat yang meminta masyarakat agar jangan panik karena Covid-19; justru negara harus transparan terkait data kasus Covid-19 agar kepanikan dapat diredam dengan tindakan preventif dini.

Setelah eufemisme, metafora diperkenalkan oleh Achmad San sebagai bagian dari studi linguistik kritis. Dalam tulisan “Metafora dan Alat Perang Wacana”, disebutkan dengan jenaka metafora dalam fungsinya yang lebih spesifik: *mengkonstruksi realitas*. Penutur bahasa bukanlah penutur netral; ketika berbahasa, mereka membentuk sebuah konsepsi ideal di dalam kepala orang lain dan memaksanya melihat dunia dengan konsepsi ideal serupa.

Esai tersebut adalah panggung Achmad San untuk mengkritik metafora yang bertebaran dalam Pilpres 2014 dan 2017 yang membelah rakyat dalam dualitas-konfrontatif (musuh-kawan, togog-kadrun, pemenang-pecundang).



Dalam dualitas-konfrontatif, jalan tengah dihilangkan; manusia dipaksa menjadi salah satunya.

Achmad San juga mengulas kritik Benedict Anderson terhadap sejarah dan politik peralihan ejaan di Indonesia—sesuatu yang jarang dikupas di kalangan intelektual sebagai pengguna aktif bahasa Indonesia.

Peralihan ejaan bahasa Indonesia punya motif politis. Mulanya, bahasa Indonesia dipelopori oleh bangsa

Tionghoa-Melayu yang menerapkan kaidah bahasa Melayu dalam sastra mereka. Demi memutus mata rantai pemikiran progresif Melayu, Belanda meresmikan Ejaan Van Ophuysen yang didominasi kaidah penulisan khas Eropa. Tujuannya adalah agar generasi baru merasa asing membaca karya dalam ejaan lama.

Maka dua tahun revolusi kemerdekaan, Indonesia meresmikan Ejaan Soewandi yang, sayangnya, lima puluh tahun kemudian, Orde Baru menggantinya dengan Ejaan Yang Disempurnakan yang sangat kaku dan formal. Penggantian itu memutus mata rantai intelektualisme kiri berikut sejarahnya di Indonesia, yang banyak ditulis dalam Ejaan Soewandi. Diksi khas Aroma revolusioner dalam Soewandi pun berubah, misalnya “revolusi kemerdekaan” diganti menjadi “perang kemerdekaan”.

Salah satu esai dalam buku ini mengulas peran sapaan dalam mengkonstruksi “jarak ideal” antara penyapa dan pesapa. Penggunaan kata “bung” di awal kemerdekaan adalah cara elit politik memelopori keegaliteran dalam bernegara, sebab presiden dan menteri pun saling memanggil bung. Di masa Orde Baru, sapaan berubah menjadi “pak”: jarak antara penyapa dan pesapa kemudian melebar.

Para intelektual memilih disapa dengan sapaan khas rakyat, misalnya Cak Nun, Cak Nur atau Gus Dur (alih-alih dipanggil kiai), agar rakyat merasa dekat. Dinamika dalam masyarakat juga bisa mengkonstruksi sapaan. Masyarakat Jawa Timur melawan rezim bahasa Jawa Tengah yang sangat hirarkis itu dengan mengembangkan sebutan khas rakyat yang lebih egaliter, seperti *kon* (kamu) yang merupakan paduan *kowe* (Jawa) dan *be'en* (Madura). Rezim bahasa dilawan dengan rezim bahasa baru.

Achmad San melalui buku ini juga turut mengkritik candaan Mahfud MD yang menyamakan istri dan virus Corona. Menurut Mahfud MD, semua lelaki pernah mencoba menaklukkan istri, namun mereka pasti tidak mampu; yang bisa mereka lakukan hanyalah berdamai. Kesimpulan Achmad San, candaan Mahfud MD itu seksis. Sebetulnya saya kurang setuju dengan kritik heroiknya. Mahfud MD bukan idola saya, tapi candaannya justru memuat kritik terhadap lelaki. Kebodohan lelaki adalah menganggap perempuan benda yang bisa dikuasai, padahal perempuan berdaulat atas dirinya sendiri. Sama halnya dengan antroposentrisme yang membolehkan menaklukkan alam, padahal semakin manusia berhasil menaklukkannya semakin sesungguhnya manusia mengundang bencana. Saya tidak menemukan alasan untuk marah pada candaan Mahfud MD.

Terlepas dari kritik Achmad San dan ketidaksetujuan saya, membaca buku ini memberi saya hidayah tentang nikmatnya bermain bahasa. Achmad San rupanya telah lama menikmatinya. Ia menelusuri ideolek presiden-presiden Indonesia, pengaruh militer dalam budaya bahasa Indonesia, pepatah petiti Jawa, bahkan tentang kamus yang tidak ramah gender. Ia menulis dengan tenang dan jitu, dan banyak memperkenalkan kosakata-kosakata baru yang menunjukkan betapa kayanya penelusurannya terhadap bahasa.

Achmad San merasa ia dan masyarakat telah lama dikuasai dan digerakkan oleh kata-kata. Ia tidak sadar, perlahan, lewat buku ini setidaknya, ialah yang tumbuh menguasai kata-kata dan akan segera menggerakkan pikiran masyarakat. []

IBU



Sudah seminggu ini ibu mengurung diri di kamar. Sesekali terdengar sesungguhnya terasa berat. Kami sekeluarga bingung bukan kepalang. Pasalnya, makanan dan minuman yang kami sediakan sama sekali tak disentuhnya. Ibu keluar kamar hanya ke kamar mandi dan untuk shalat saja. Bapak sudah meninggal dua puluh tahun yang lalu. Kapal yang ditumpanginya dari Bali menuju Banyuwangi mengalami kebocoran, hingga tenggelam. Tak ada satupun penumpang maupun awak kapal yang selamat. Satu hari kemudian mayat Bapak ditemukan oleh nelayan yang melaut di perairan banyuwangi. Ibu amat terpukul dengan tragedi itu, hingga kini. Ketika ia duduk berdiam diri, bulir air matanya sering menetes merambati pipinya yang keriput, teringat mendiang Bapak. Kalau sudah begitu, kami_anak-anaknya tak berani mendekat, bahkan hanya untuk sekedar menghibur. Ya, Ibu sangat mencintai kami semua_keluarganya, melebihi segalanya. Wajar jika Ibu terlalu dalam meluapkan rasa pedih. Air mata hanya pelengkap pilu saja.

“Lusi! Lusi! Anakku.” Malam ini ibu mengigau lagi. Kebetulan malam ini giliran aku yang menjaga ibu dengan tidur di kursi tamu dekat kamar Ibu. Ya, kami tak mau ambil resiko kalau terjadi apa-apa dengan Ibu.. Aku sendiri tak pernah menghitung berapa kali dalam sehari Ibu mengigau menyebut nama adik terkecil kami. Kakak tertuaku, Mas Arman yang kini hidup dengan anak dan istrinya di Jakarta menyempatkan diri untuk menjenguk Ibu. Begitu juga dengan Mbak Sarah. Itupun atas permintaanku, dengan harapan membesarkan hati Ibu. Tapi sampai detik ini hasilnya nol.

“Sul, Samsul.....,” samara-samar kudengar Ibu memanggilku. Aku loncat dari kursi. Mendekati kamar Ibu.

“Ibu memanggilku,” tanyaku pelan, karena aku takut kalau



Ghufon

Lahir di Pati 14 Oktober 1981. Menyelesaikan studi Magister Agama dan Studi Perdamaian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015). Saat ini aktif di Asean Muslim Action Network (AMAN) Indonesia.

Ibu hanya mengigau.

“Lusi sudah pulang, Sul? Pertanyaan itu lagi, sudah berapa kali ia menanyakan pertanyaan yang sama. Tak terhitung.

“Belum, Bu,” jawabku berat.

“Kamu tidur di kamarmu saja, tidak usah menunggu Ibu di luar.”

Aku tak berani menyahut lagi. Kembali kurebahkan tubuhku di kursi, menyambung kantukku yang tertahan.

Fajar merekah. Matahari mulai mengintip.

Buru-buru kunyalakan televisi. Kami tak mau ketinggalan berita. Mas Arman dan Mbak Sarah menyusul kemudian. Selalu harap-harap cemas yang menggelayuti ubun-ubun kami. Ya, harapan yang tinggal harapan. Karena sudah hampir seminggu ini Lusi belum diketemukan. Sedang sebagian korban lainnya sudah jelas nasibnya. Sebagian kecil selamat, selebihnya terapung menjadi mayat dan masih ada puluhan yang belum diketemukan. Termasuk Lusi.. Kami pun sebenarnya mulai pasrah, tapi entah bagi Ibu.

Seminggu yang lalu terjadi pertengkaran kecil Lusi dengan Ibu. Lusi bersama teman-teman kulainya mendapat tugas penelitian di luar Jawa, tepatnya di Kalimantan. Ibu jauh-jauh hari mewanti-wanti agar Lusi jangan naik kapal.

“Naik pesawat saja, Lusi. Biar nanti Ibu yang menambahi ongkosnya.”

“Tapi, Bu, Lusi dan teman-teman sepakat naik kapal, ya sekalian nambah pengalaman, karena kami belum pernah nyeberang lautan.” Kilah Lusi.

“Tapi, Lus, Ibu tidak mengizinkan kamu naik kapal”

“Kenapa, Bu?”

“Pokoknya sekali tidak ya tidak. Titik.” Ibu langsung membuang muka, lalu masuk kamar. Lusi hanya terbelenggu, tak habis pikir dan mengerti apa maksud Ibu melarangnya naik kapal.

Memang, waktu musibah tenggelamnya kapal yang ditumpangi Bapak, Lusi masih dalam gendongan Ibu. Barangkali Lusi hanya terbelenggu kata-kata kerabat atau teangga yang diucapkan padanya sambil mengelus kepalanya; *Bapakmu mau ngaji di surga nduk, dido'akan ya.....* Dan saat pemakaman pun Lusi tak tahu, karena adat di daerah kami melarang anak kecil ikut upacara pemakaman. Takut *sawannen*, begitu kata orang.

Tidak seperti Ibu, aku, Mas Arman dan Mbak Sarah yang amat terpukul dengan kematian Bapak. Mbak Sarah harus melepas harapannya menjadi sarjana karena desakan ekonomi. Mas Arman harus banting tulang membiayai sekolahnya sampai lulus Madrasah Aliyah. Sedangkan aku disekolahkan Pakde Rusdi__ adik sepupu Bapak, dengan aku ikut membantu menjaga tokonya selepas sekolah. Ya, roda keluarga kami mendadak seret dan berderit. Maklum, almarhum Bapak hanya seorang sopir truk. Jadi, tak ada jaminan ekonomi sepeninggalnya layaknya kalangan pegawai negeri.

Ibu cepat sekali tua. Beban yang dipikul terlalu

berat buat seorang ibu. Ditambah proses kematian Bapak yang terus menghantui pikiran Ibu. Ibu tidak ingin lagi kejadian serupa menimpa kami sekeluarga.. Trauma, ya kata itulah yang tepat untuk menggambarkan suasana batin kami saat itu sampai kini, kecuali Lusi kecil yang masih polos, belum paham tentang musibah dan kematian. Baru ketika menginjak kelas 4 SD Lusi baru mulai paham kalau Bapak mengaji di akherat dan tak akan pernah kembali lagi di dunia ini.

“Ibu, Lusi minta do’a restu agar selamat sampai kembali.” Mata ibu berkaca-kaca. sebentar kemudian mata Ibu basah. Bibir Ibu bergetar, berat. Hendak menahan kepergian Lusi. Lusi memang keras kepala sejak kecil. Semua keinginannya tak terbendung. Kami memakluminya karena tiadanya didikan dan kehadiran seorang Bapak dalam perkembangan jiwanya.

“Ibu tenang saja, Lusi bisa menjaga diri kok. Cuma dua minggu kok, Bu. Ibu berdo’a saja, agar Lusi dan teman-teman Lusi selamat sampai ke rumah kembali.” Lusi langsung menyaut dan mencium tangan Ibu.

“Assalamu’alaikum.” Barangkali itulah salam dan kata terakhir yang kami dengar dari mulut Lusi, hingga kini.

Subuh baru saja berjingkat, ibu membangunkanku. “Tolong temeni Ibu, Samsul.” Aku hanya mengangguk, tanpa pikir panjang dan tanya ini-itu. Tapi sempet juga kutanyakan hendak kemana aku diajaknya, Ibu hanya diam dan memandang tajam mataku. Aku cepat-cepat menghindari dari tatapan ibu. Aku tak berani menolak ajakan Ibu, apalagi di saat kejiwaan Ibu yang seperti ini.

Dingin menyambut kami, bergegas aku dan Ibu keluar tanpa sepengetahuan Mas Arman dan Mbak Sarah. Aku masih bertanya dalam hati. Apa yang dimau ibu? Tapi aku tak berani mengungkapkannya. Pikiranku sendiri tak dapat berandai-andai apa yang hendak dilakukan Ibu. Aku cukup diam saja. Toh, nanti aku sendiri juga mengetahuinya. Langkah ibu tegap, dan bahkan mulai mengencang. Seperti ada kekuatan yang menuntun tubuh itu. Mata ibu

lurus, mengikuti jalan yang lengang, tak menoleh sedikitpun padaku yang menguntitnya. Cericit burung seperti memberi uluk salam padanya. Langit perlahan menyembulkan pendaran mentari.

Sudah hampir sekitar setengah jam kami berjalan. Masih suasana membisu. Tak ada reaksi dari ibu. Tapi aku mulai bisa meraba, kemana ibu hendak melabuhkan langkahnya. Ya, ke sebuah pantai. Sebuah pantai sepi di kota kecilku. Aku sendiri jarang pergi ke pantai ini, meski lumayan ramai juga pas musim liburan. Itupun karena larangan ibu. Maka terasa aneh bila Ibu mengajakku ke pantai seperti pagi ini.

Semilir angin pantai menyambut kami. Sejuk. Ibu mulai mengendurkan lajunya., menuju bibir pantai. Pada sebuah karang kecil Ibu menambatkan kakinya. Ibu menoleh padaku.

“Majulah, Samsul, dekat ibu,” pinta Ibu lirih. Aku mendekatinya.

“Kamu tahu, mengapa Ibu kemari.” Aku menggeleng. Lalu Ibu melanjutkan,

“Semalam, Lusi menjumpaiku lewat mimpi. Ia mengajakku ke pantai ini untuk bermain. Ia berlari-lari riang, berguling-guling di pasir, bersendau dengan ombak. Tawanya utuh, tanpa kesedihan. Namun tiba-tiba....” Sejenak mulut Ibu terkunci. Kristal bening mengalir deras. Aku hanya tertunduk, diam. Hening. Kupeluk ibu erat-erat. Dalam isak ibu melanjutkan.

“Tiba-tiba...ombak besar menelan tubuh adikmu. Ia menjerit minta tolong. Ibu mencoba mengejar, tapi sia-sia. Dalam sekejap, adikmu terbenam lautan.”

“Tapi, sudahlah. Ibu jadi sadar, kalau Lusi memang sudah dipanggil-Nya. Takdir ini harus kita terima.” Aku terpaku. Perlahan Ibu melepas pelukanku.. Ibu meminta aku menuntunnya menuruni karang. Dibiarkannya kedua kakinya terguyur riak gelombang. Ibu membuka bungkusan plastik yang sejak tadi diapitnya, dan aku sendiri baru tahu kalau isinya bunga lili untuk ziarah. Ziarah? Pada siapa? Lusi? aku menebak.

“Samsul, kita doakan adikmu supaya arwahnya tenang dan mendapat tempat disisi-Nya.”

Tangan ibu mulai menaburkan bunga-bunga dengan lentiknya, diiringi sapuan angin pantai yang membawa do’a Ibu untuk anaknya di alam akhirat.



Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar, bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di satuan pendidikan kemudian berpindah menjadi belajar dari rumah. Guru dan peserta didik terlibat dalam pembelajaran jarak jauh yang menghadirkan sejumlah tantangan mulai dari ketersediaan peralatan digital dan jaringan internet, kondisi psikososial peserta didik maupun guru, disparitas kompetensi guru hingga rendahnya keterlibatan orang tua/wali peserta didik dalam pembelajaran.

Meski beragam kondisinya, hampir semua peserta didik, guru, dan orang tua mengalami pengalaman belajar berbeda yang membutuhkan waktu adaptasi. Meski telah banyak kebijakan dan program untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, perubahan pola pembelajaran yang begitu drastis berisiko menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran. Padahal kualitas pembelajaran merupakan kunci dari hasil belajar peserta didik. Jika kualitas belajar menurun, hasil belajar peserta didik pun cenderung menurun (*learning loss*).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMAN di Masa Pandemi COVID-19. Sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama tersebut untuk dioperasionalkan oleh guru dan tenaga kependidikan, maka disusun Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMAN di Masa Pandemi COVID-19.

Panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan sehingga diharapkan dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Satuan pendidikan dapat melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan panduan ini.



GEJALA AKRONIMISASI

Kreativitas masyarakat Indonesia dalam berbahasa tak perlu diragukan lagi. Kreativitas itu turut menyumbang tidak sedikit istilah ke dalam lema kamus di era informasi digital yang berkembang begitu pesat ini. Seiring dunia yang berjalan cepat, kata-kata pun mau tak mau bergerak gesit mengekornya.

Maka, tak heran kalau kemudian produksi kata-kata dari mereka, manusia di era digital ini, juga tampak ringkas. Lihat saja: *baper*, *mager*, *pansos*, *bucin*, *japri*, dan seterusnya. Kesemuanya merupakan akronim yang dibentuk dari dua kata: *baper* ([ter]bawa perasaan), *mager* (malas gerak), *pansos* (panjat sosial), dan *japri* (jalur pribadi). Sejalan dengan roh akronim yang dilafalkan sebagai sebuah kata yang wajar, istilah *baper* pun, misalnya, lebih melekat dan tentu gampang diingat ketimbang (*ter*)bawa perasaan. Yang lain, saya kira, juga bernasib sama.

Di satu sisi, kita mesti mengakui akronimisasi semacam itu turut memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Buktinya, pekamus mewadahi dan membakukan beberapa istilah baru seperti di atas. Tapi, di sisi lain, tepat di titik inilah masalah tiba.

Lupa Dalamnya

Akronim yang disampaikan secara berulang-ulang dan terus-menerus akan membuat kepanjangannya hampir terlupakan. Demikian tesis yang diajukan Uksu Suhardi, redaktur (senior)

bahasa *Tempo*. Karena itu pula, *Tempo* membantar akronimisasi. Barangkali ada yang belum tahu, bahkan bisa jadi tidak mengira, bahwa *kloter* itu kepanjangan dari adalah *kelompok terbang*. Media-media pun amat jarang, untuk tidak menyebut tak pernah, menuliskan kepanjangan dari *kloter*. Berikut contohnya:

"Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan tidak memberangkatkan *kloter* haji tahun 2021. Hal tersebut lantaran ancaman pandemi Covid-19 masih di depan mata."

"...Mereka berdua seharusnya masuk dalam *kloter* jemaah yang diberangkatkan pemerintah pada ibadah haji 1441 Hijriah/2020 lalu. Ia bercerita sudah menunggu selama delapan tahun untuk berangkat haji ke tanah suci."

Setali tiga uang dengan *rudal* yang pada mulanya berasal dari *peluru kendali*, *cekal* dari *cegah dan tangkal*, *tilang* dari *bukti pelanggaran*, atau *sinetron* dari *sinema elektronik*. Seolah-olah (dan memang demikian) istilah itu berdiri sendiri. Padahal, kalau diminta untuk mendefinisikan, bisa jadi kesusahan juga. Nasibnya tak jauh berbeda dengan kata, eh, akronim produksi kaum milenial tadi. Kepanjangan keempat kata di atas tidak serta-merta tertulis pada pemberitaan media massa.



Achmad Santoso

Editor Bahasa Jawa Pos

"Israel mengumumkan teknologi persenjataan terbaru mereka berupa senapan laser udara yang bisa digunakan untuk tembak jatuh *drone*, roket, hingga *rudal* balistik.

"Kejati juga mengeluarkan surat *pencekalan* agar kedua tersangka tidak melarikan diri. Kerugian negara akibat korupsi itu mencapai Rp240 miliar."

"...Para pelanggar tidak perlu lagi membayar denda *tilang* secara tunai di kantor kejaksaan."

"Penonton Indonesia pasti tidak asing lagi dengan *sinetron Preman Pensiun* yang tayang pada bulan Ramadhan lalu."

Soal melupakan kepanjangannya ini, nasib serupa menimpa DPR (singkatan, bukan akronim). Akibat dibiarkan melenggang tanpa kepanjangan begitu saja, anggotanya lupa bahwa di dalam DPR ada kata *rakyat*. Rakyat yang seyogianya menjadi konstituennya dan mereka wakil keinginannya. Karena itu, pakar bahasa Holy Adib menginginkan agar DPR ditulis sebagaimana kepanjangannya: Dewan Perwakilan Rakyat. Agar para anggota dewan tidak alpa bahwa di dalam lembaganya tercantum kata *rakyat*.

KPK itu sebetulnya juga lebih baik tidak berulang-ulang diringkas. Sebab, khawatir *pemberantasan korupsi*-nya kurang bertaring dan fokus pada pencegahan semata. Alangkah lebih

baiknya ditulis lengkap lebih dahulu, Komisi Pemberantasan Korupsi, baru disingkat KPK. Pengaburan semacam itulah yang eksesnya dikhawatirkan Goenawan Mohamad.

Menurutnya, bahasa yang didominasi kata-kata yang diringkas, diulang bersama-sama, tanpa dipikirkan dan diuraikan akan membuat orang tak lagi diberi kesempatan untuk menelaah. Ia, misalnya, mencontohkan *manipol* gagasan Bung Karno. Istilah itu seperti berdiri sendiri, padahal di dalamnya ada *manifesto* dan *politik*. Dan, kita rasanya tak dirangsang untuk menilai isi manifesto itu.

Manifes kebudayaan, lanjut Goenawan, yang lantas disingkat menjadi *manikebu* dan disebar berkali-kali membuat orang juga lupa bahwa di situ ada kata *manifes* dan *kebudayaan*, dua pengertian yang memerlukan pemikiran.

KPK itu sebetulnya juga lebih baik tidak berulang-ulang diringkas. Sebab, khawatir pemberantasan korupsi-nya kurang bertaring dan fokus pada pencegahan semata.

“Dalam dunia politik, akronim (dan singkatan) juga menjadi arena “pertarungan” ideologi dua kubu yang berseberangan: Soekarno dan Soeharto. Di satusisi, kubu Soekarno menggunakan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Sementara di sisi lain, kubu Soeharto memilih untuk memasyarakatkan G 30 S/PKI.”

Bahkan, dalam dunia politik, akronim (dan singkatan) juga menjadi arena “pertarungan” ideologi dua kubu yang berseberangan: Soekarno dan Soeharto. Di satu sisi, kubu Soekarno menggunakan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Sementara di sisi lain, kubu Soeharto memilih untuk memasyarakatkan G 30 S/PKI.

“Keunikan” Lain

Keunikan di sini mesti diberi kutip. Sebab, maksudnya lebih mengarah ke aneh, bahkan sumbang. Ketika riuh soal pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pada sembako, lalu di dalamnya memuat 11 atau 12 bahan pokok yang terdampak, saya langsung berpikiran ganjil. Padahal, *sembako* itu pada mulanya akronim dari *sembilan bahan pokok*, tapi diingkari menjadi 11 atau 12 jenis.

Itulah “bahaya” akronim yang terkadang tak hanya mengacaukan tatanan bahasa, tapi juga mengganggu pikiran kita. Akronim memang suka-suka demi kemudahan penyampaian informasi. Tapi, bagi saya yang bergelut dengan dunia bahasa, terasa ganjil juga ketika pemerintah memilih untuk mengakronimkan *minuman beralkohol* dengan *minol*, dan pada saat yang lain meringkas *minuman keras* menjadi *miras*. Sebuah proses pembentukan yang tidak senapas, yang malangnya telah disahkan menjadi sebuah rancangan undang-undang. Padahal, akan lebih

baik jika menggunakan istilah *mihol* dan *miras*: pas.

Hal “unik” lain pernah terjadi pada kata *pelakor*, yang umumnya kita kenal berasal dari *perebut laki orang*. Tapi, karena suka-suka yang bikin, dengan daya kreativitasnya lantas digunakan di dunia kesehatan. Jadilah di sebuah seminar yang digelar Dharma Wanita Persatuan Kota Sukabumi itu, terpampang tema “Antisipasi Pelakor di Masa Pandemi”. Usut punya usut, *pelakor* di situ maksudnya adalah *penyakit lansia dan komorbid*. Apa yang menarik? Di dalam akronim *pelakor* itu ada akronim juga: *lansia* (dari lanjut usia).

Memang ada yang setuju terhadap melimpah ruahnya akronim (dan singkatan). Tak sedikit pula yang tidak setuju. Mereka yang setuju menyebut bahwa akronim itu wujud kreativitas berbahasa dan cara ringkas berkomunikasi. Sebab, prinsip komunikasi adalah adanya kesepahaman antara penutur (komunikator) dan petutur (komunikan). Akronim sekaligus berfungsi untuk membentuk kata baru, biasanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagi mereka yang tidak setuju, ada anggapan bahwa tsunami akronim akan membuat pikiran menjadi rancu. Akronim cenderung hanya dimengerti oleh kalangan tertentu. Contohnya banjir akronim di dunia militer. Tak kurang dari seorang Ajip Rosidi mengeluhkan kegemaran dan berlewatnya masyarakat Indonesia membuat akronim dan singkatan. (*)

DEWI PERSSIK

Akun IG Hilang dan Dibajak

Berita tentang akun media sosial artis yang tiba-tiba hilang atau dibajak pihak tidak bertanggungjawab memang kerap terjadi. Kali ini korbannya adalah artis dangdut pelantun *Mimpi Manis* yaitu Dewi Perssik.

Akun Dewi Perssik mendadak hilang dan tidak dapat ditemukan lagi di *Instagram*. Kabar tersebut diumumkan melalui unggahan sang suami, Angga Wijaya.

Angga Wijaya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun *Instagram* yang mengatasnamakan Dewi Perssik.

Terlebih lagi, jika berkaitan dengan *endorsement* atau meminta uang. Angga Wijaya memastikan bahwa hal tersebut berpotensi menjadi penipuan.

"Perhatian, hati-hati dengan oknum yg tidak bertanggung jawab dengan mengatas namakan akun DEWI PERSSIK untuk penipuan atau pemungutan biaya dalam bentuk endorse atau apapun," tulis Angga Wijaya pada Rabu (23/6).

Lebih lanjut, Angga Wijaya mengatakan bahwa hingga saat ini Dewi Perssik belum membuat *Instagram* baru.

"Mohon jangan dipercaya, karena sampai saat ini Dewi Perssik tidak memiliki insatgram lain atau instagram baru," sambungnya.

Dalam unggahannya itu, Angga Wijaya menunjukkan salah satu contoh akun *Instagram* palsu yang mengatasnamakan istrinya.

"Jadi mohon di chek ulang apa bila ada yg mengatasmakan akun DEWI PERSSIK, contoh nya @dewipersik_real2 @dewipersik_reall atau yg lainnya, itu bukan akun asli alias palsu/fake," tegas Angga Wijaya.





ROSSA

Keluar Uang Duluan untuk Liburan

Dalam menjalin hubungan asmara, laki-laki jamak mengeluarkan uang untuk membelikan belanjaan pasangan perempuannya. Entah sekedar makan di gerobak pinggir jalan atau belanja di mall.

Namun hal yang berbeda terjadi pada Rossa. Dirujuk dari *Podcast* Ivan Gunawan, pria yang akrab disapa Igun itu menyebut bahwa Rossa kerap membayari keperluan Afgan ketika liburan. Rossa yang mengeluarkan uang dari dompet untuk acara liburan bersama.

Hubungan Rossa dan Afgan ternyata sudah diketahui lama oleh Igun. Igun menceritakan hubungan keduanya yang sudah berlangsung beberapa tahun belakangan.

Menurut Igun, Afgan tak pernah mengeluarkan duit jika pergi bersama wanita yang karib disapa Ocha itu.

“Tahu enggak paling seru liburan sama Ocha, kenapa? kalau liburan sama Ocha aku enggak pernah keluar duit, Afgan itu juga enggak pernah keluar duit,” kata Igun, di *Podcast*nya bersama dengan Rossa, baru-baru ini.

Mendengar pernyataan Ivan Gunawan, Rossa hanya bisa tertawa. Dia mengatakan bahwa tudingan pria yang karib disapa Igun itu kepada Afgan salah.

“Enak aja, itu fitnah deh, sekali-kali doang (Rossa bayarin Afgan),” ungkap Rossa.

Ivan Gunawan tak terima dengan pernyataan Rossa. Dia mengaku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Rossa sering kali membayari Afgan saat sedang liburan.

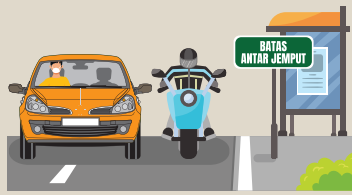
“Enggak, pergi beberapa kali sama mami (Rossa), sama Afgan, dia enggak pernah keluarin dompet,” kata Ivan.

Rossa pun berkelit. Dia mengaku memang menanggung biaya di awal saja. Namun, uang itu kemudian diganti oleh Afgan.

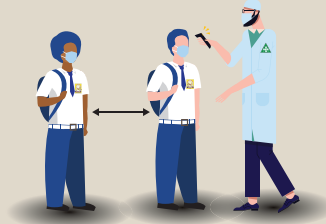
“Kan ntar direimbust,” seloroh Rossa.

AKTIVITAS WARGA DI SEKOLAH

SEBELUM MASUK GERBANG



Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan



Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

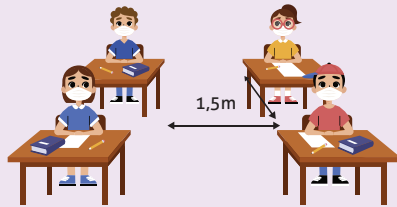


Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;



Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.

SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR



Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter



menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi



dilarang pinjam-meminjam peralatan



memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak

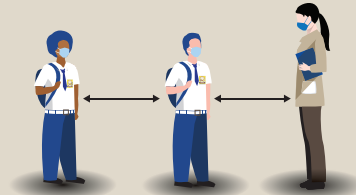


melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.

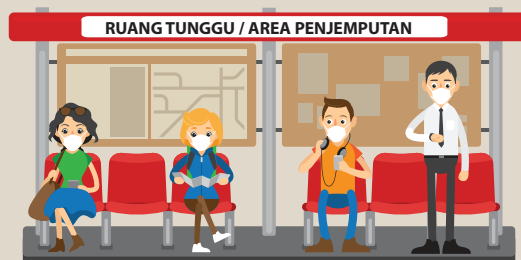
SELESAI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR



Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas



Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak



Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Bisa Transaksi Apa Aja, Dimana Aja, Kapan Aja

**Top Up
Uang Elektronik**



**Beli
Paket Data
& Pulsa**



**Beli Voucher
& Bayar Listrik**



**Bayar
Kartu Kredit**



Transfer



Bayar Tagihan

Download Sekarang di :

